

**DETERMINAN KEMISKINAN DENGAN
TINGKAT PENGANGGURAN SEBAGAI
VARIABEL MEDIATOR DI PROVINSI ACEH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:
MUTHMAINNAH MUKHTAR
NIM. 22 402 00113

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**DETERMINAN KEMISKINAN DENGAN TINGKAT
PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIATOR DI PROVINSI ACEH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Oleh:*

MUTHMAINNAH MUKHTAR

NIM. 22 402 00113

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**DETERMINAN KEMISKINAN DENGAN TINGKAT
PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIATOR DI PROVINSI ACEH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

MUTHMAINNAH MUKHTAR

NIM. 22 402 00113

Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darwis H.', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI, M. Si
NIP. 187808182009011015

Pembimbing 2

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ananda', is written over a horizontal line. To the right of the signature, the text 'Acc 21 Mei 2026' is written in black ink.

Ananda Anugrah Nasution, S. E, M. Si.
NIP. 1991017202021008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

Hal : Lampiran Skripsi
An. Muthmainnah Mukhtar

Padangsidempuan, 26 Mei 2026

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi/tesis an. **Muthmainnah Mukhtar** yang berjudul **Determinan Terhadap Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan teima kasih.

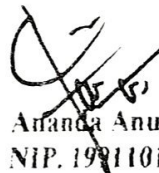
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI, M. Si
NIP. 187808182009011015

Pembimbing II



Aranda Anugrah Nasution, S. E, M. Si.
NIP. 1981101720202100

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthmainnah Mukhtar
NIM : 2240200113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka
Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Juni 2026

Saya yang Menyatakan



MUTHMAINNAH MUKHTAR
NIM. 2240200113

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah Mukhtar
NIM : 2240200113
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islamnegeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Paddangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh”** Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangssdimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, daan mempublikasikan tugas akhir aya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 15 Juni 2026
Saya yang Menyatakan



MUTHMAINNAH MUKHTAR
NIM. 2240200113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muthmainnah Mukhtar
NIM : 2240200113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh

Ketua

Dr. Sarmiana Batubara, MA
NIDN. 212707038601

Sekretaris

Ananda Anugrah, M. Si
NIDN. 117109102

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, MA
NIDN. 212707038601

Ananda Anugrah, M. Si
NIDN. 117109102

Lismawati Hasibuan, M. Si
NIDN. 2023058102

Muhammad Wandiyah R. Hutagalung, M. E
NIDN. 2027029303

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 15 Juni 2026
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/82,75(A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,74
Predikat : Dengan Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

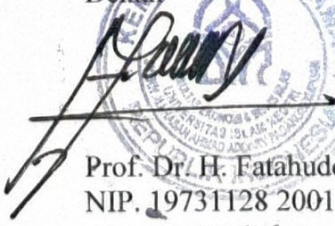
PENGESAHAN

Nomor: *2204* /Un.28/G/G.4a/PP.00.9/06/2026

**Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh**
Nama : Muthmainnah Mukhtar
NIM : 2240200113

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 29 Juni 2026
Dekan


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Agl
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Muthmainnah Mukhtar
NIM : 2240200113
Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena stagnasi angka kemiskinan di Provinsi Aceh yang tetap berada di atas rata-rata nasional serta menjadi yang tingkat kemiskinan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan, serta menganalisis pengaruh tidak langsung kedua variabel tersebut terhadap kemiskinan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediator. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan ruang lingkup wilayah mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan merupakan data panel yang menggabungkan data antar ruang (cross-section) dan runtun waktu (time series) selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga menghasilkan total 115 observasi. Alat olah data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak SmartPLS 4 dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan maupun terhadap TPT, yang mengindikasikan terjadinya fenomena jobless growth di Provinsi Aceh. Di sisi lain, IPM terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta terhadap TPT. TPT sendiri ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan uji efek mediasi, TPT tidak mampu menjadi variabel mediator dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Namun, TPT terbukti mampu menjadi variabel mediator yang signifikan dalam pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan dengan arah koefisien negatif, meskipun efek mediasi yang dihasilkan tergolong lemah karena pengaruh langsung IPM jauh lebih dominan dalam mereduksi kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata-kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, PLS-SEM

ABSTRACT

Name : Muthmainnah Mukhtar
Reg. Number : 2240200113
Thesis Title : *Determinants of Poverty with the Open Unemployment Rate as a Mediating Variable in Aceh Province*

This research is motivated by the stagnation of poverty rates in Aceh Province, which remain above the national average and stand as the highest in Sumatra Island, despite the region showing a positive economic recovery trend post-pandemic COVID-19 and a consistent increase in the Human Development Index (HDI). The purpose of this study is to analyze the direct effects of economic growth and HDI on poverty rates, as well as to analyze the indirect effects of both variables on poverty through the Open Unemployment Rate (TPT) as a mediating variable. The type of research used is quantitative research, with a geographical scope covering 23 districts/cities in Aceh Province. The data utilized is panel data, which combines cross-sectional and time-series data over a 5-year period from 2020 to 2024, resulting in a total of 115 observations. The data processing tool applied in this study is SmartPLS 4 software, with data analysis techniques employing the Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach and path analysis. The results show that economic growth has no significant effect on either poverty rates or TPT, indicating the phenomenon of jobless growth in Aceh Province. On the other hand, HDI is proven to have a significant negative effect on both poverty rates and TPT. TPT itself is found to have a significant positive effect on poverty rates. Based on the mediation effect test, TPT is unable to serve as a mediating variable for the effect of economic growth on poverty. However, TPT is proven to be a significant mediating variable for the effect of HDI on poverty rates with a negative coefficient direction, although the resulting mediation effect is classified as weak because the direct effect of HDI is far more dominant in reducing poverty in Aceh Province.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Human Development Index, Open Unemployment Rate, PLS-SEM*

المستخلص

الاسم :مطمئنة مختار
رقم القيد : ٢٢٤٠٢٠٠١١٣
عنوان الرسالة :محدّدات الفقر مع معدل البطالة المفتوحة كمتغير وسيط في مقاطعة آتشيه

ينطلق هذا البحث من ظاهرة ركود معدلات الفقر في محافظة آتشيه والتي لا تزال أعلى من المعدل الوطني وتعتبر الأعلى في جزيرة سومطرة، على الرغم من أن المنطقة أظهرت اتجاهًا إيجابيًا للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-١٩ وارتفاعًا مستمرًا في مؤشر التنمية البشرية (إيه-بي-إيم). (الهدف من هذه الدراسة هو تحليل التأثيرات المباشرة للنمو الاقتصادي ومؤشر التنمية البشرية على معدلات الفقر، بالإضافة إلى تحليل التأثيرات غير المباشرة لكلا المتغيرين على الفقر من خلال معدل البطالة المفتوحة) تي-بي-تي (كمتغير وسيط. نوع البحث المستخدم هو البحث الكمي، ويغطي النطاق الجغرافي ٢٣ منطقة/مدينة في محافظة آتشيه. البيانات المستخدمة هي بيانات بانيل داتا التي تجمع بين البيانات المقطعية) كروس-سيكشن (والسلاسل الزمنية) تايم-سيريس (على مدى فترة ٥ سنوات، من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٤، مما ينتج عنه إجمالي ١١٥ ملاحظة. أداة معالجة البيانات المطبقة في هذا البحث هي برنامج سمارت بي-إل-إس ٤، وتستخدم تقنيات تحليل البيانات منهجية النمذجة بالمعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية (بارشال ليرست سكويرز - ستركتشرال إكويشن موديلنج) وتحليل المسار) فات أناليسيس. (أظهرت النتائج أن النمو الاقتصادي ليس له تأثير معنوي على معدلات الفقر ولا على معدل البطالة المفتوحة) تي-بي-تي، مما يشير إلى حدوث ظاهرة "جوليس غروث" في محافظة آتشيه. ومن ناحية أخرى، ثبت أن مؤشر التنمية البشرية (إيه-بي-إيم) له تأثير سلبي ومعنوي على كل من معدلات الفقر ومعدل البطالة المفتوحة. وجد أن معدل البطالة المفتوحة) تي-بي-تي (نفسه له تأثير إيجابي ومعنوي على معدلات الفقر. وبناءً على اختبار تأثير الوساطة، فإن معدل البطالة المفتوحة) تي-بي-تي (غير قادر على أن يكون متغيرًا وسيطًا في تأثير النمو الاقتصادي على الفقر. ومع ذلك، ثبت أن معدل البطالة المفتوحة) تي-بي-تي (متغير وسيط معنوي في تأثير مؤشر التنمية البشرية) إيه-بي-إيم (على معدلات الفقر باتجاه معامل سلبي، على الرغم من أن تأثير الوساطة الناتج يصنف على أنه ضعيف لأن التأثير المباشر لمؤشر التنمية البشرية) إيه-بي-إيم (هو الأكثر هيمنة بكثير في الحد من الفقر في محافظة آتشيه.

الكلمات المفتاحية: الفقر، النمو الاقتصادي، مؤشر التنمية البشرية، معدل البطالة المفتوحة،

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang tiada sekutu bagi-Nya dan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Berkat kehendak Allah Ta'ala jugalah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni menuju Islam *kaffahrahmatanlil'alamin*.

Skripsi ini berjudul: “Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Bapak Prof. Dr. Arbanurrasyid, M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kelembaga, disertai oleh Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Purnama Hidayah Harahap, S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Sry Lestari, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ananda Anugrah, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teristimewa ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada Ummi Sabrina Pasaribu, yang sudah memperjuangkan pendidikan untuk anak-anaknya. Terima kasih telah senantiasa membimbing, mendidik, dan mendukung serta melimpahkan kasih sayang yang tak terbatas. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik sepanjang masa, merawat dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan, serta selalu menjadi penguat dan pelipur lara. Di setiap sujudnya, doa-doa tulus selalu mengalir untuk kelancaran dan kesuksesan setiap langkah kaki peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan berada di tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau, membalas seluruh tetes keringat dan perjuangannya dengan kesehatan, kebahagiaan, serta menempatkannya di Surga Firdaus-Nya kelak.

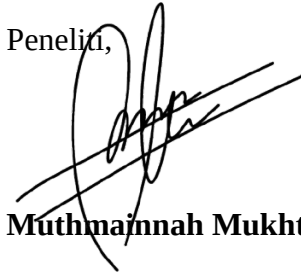
9. Teristimewa untuk (Alm.) Abi Mukhtar Shabri Panutan Terbaik peneliti. Rasa sayang kepada Beliau tidak pernah berkurang bahkan rindu yang seakan tak terbendung. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, dan motivasi yang telah Ayah tanamkan di dalam jiwa peneliti sejak kecil, yang menjadi kekuatan terbesar peneliti untuk terus melangkah hingga ke titik ini. Skripsi ini adalah salah satu wujud bakti dan pembuktian bahwa perjuangan Ayah selama ini tidak sia-sia. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya yang tak terbatas, mengampuni segala dosanya, menjadikannya ahli kubur yang penuh dengan kebahagiaan, serta menempatkannya di Surga Firdaus-Nya kelak.
10. Teruntuk Kakak peneliti (Fathimah Mukhtar) dan Abang peneliti (Zaid Radhinal Mukhtar) terimakasih telah memberikan saran dan semangat selama peneliti mengerjakan skripsi. Serta kedua adik peneliti (Dzakiyyah Mukhtar dan Azizah Mukhtar), terima kasih telah menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi. Serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman perkuliahan peneliti yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi ini, serta memberikan semangat dan nasihat kepada peneliti dalam membantu proses skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidimpuan, 26 Mei 2026

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muthmainnah Mukhtar', written over a horizontal line.

Muthmainnah Mukhtar

NIM. 2240200113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	∴	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ.....	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ..... اِ.....	Kasrah dan ya	i	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Definisi Operasional Variabel.....	14
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Manfaat Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kerangka Teori	20
1. Kemiskinan.....	20
2. Pertumbuhan Ekonomi	36
3. Indeks Pembangunan Manusia	43
4. Tingkat Pengangguran Terbuka	49
B. Penelitian Terdahulu	59
C. Kerangka Pemikiran.....	70

D. Hipotesis Penelitian.....	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	75
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	75
B. Jenis Penelitian.....	75
C. Populasi dan Sampel.....	76
1. Populasi	76
2. Sampel.....	77
D. Sumber Data.....	77
E. Teknik Analisis Data.....	78
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	79
2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>outer model</i>).....	80
3. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	82
4. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	83
5. Uji Hipotesis.....	85
6. Uji Efek Mediasi	86
F. Alur Penggunaan Aplikasi	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Provinsi Aceh.....	89
B. Gambaran Umum Variabel Penelitian	90
1. Kemiskinan (Y)	90
2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)	92
3. Indeks Pembangunan Manusia (X2)	95
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)	97
C. Analisis Hasil Penelitian	99
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	99
2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>outer model</i>).....	104
3. Evaluasi Model Stuktural (<i>inner model</i>)	105
4. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	108
5. Uji Hipotesis.....	111
6. Uji Efek Mediasi	115
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	117
E. Keterbatasan Penelitian	141

BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	4
Tabel I.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	5
Tabel I.3 Data Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	7
Tabel I.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	8
Tabel I.5 Definisi Operasional Variabel	14
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	59
Tabel IV.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	91
Tabel IV.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	93
Tabel IV.3 Data Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	95
Tabel IV.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024	98
Tabel IV.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	100
Tabel IV.6 Hasil Outer Model	104
Tabel IV.7 Hasil Analisis R^2	105
Tabel IV.8 Hasil Relevansi Prediktif	106
Tabel IV.9 Hasil Analisis <i>Effect Size</i>	107
Tabel IV.10 Hasil <i>Path Coefficient</i>	108
Tabel IV.11 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung	113
Tabel IV.12 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung.....	115
Tabel IV.13 <i>Path Coefficient</i>	116
Tabel IV.14 Pembahasan Hasil Penelitian	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	72
Gambar III.1 Kerangka Alur Penggunaan Aplikasi	88
Gambar IV.1 Hasil Uji Hipotesis	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Persentase Kemiskinan
Lampiran 2	Data Pertumbuhan Ekonomi
Lampiran 3	Data Indeks Pembangunan Manusia
Lampiran 4	Data Tingkat Pengangguran Terbuka
Lampiran 5	Model Struktural
Lampiran 6	Hasil Uji Statistik Deskriptif
Lampiran 7	Hasil Uji Outter Model
Lampiran 8	Hasil Uji Koefisien Determinan(R^2)
Lampiran 9	Hasil Uji Relevansi Pediktif(Q^2)
Lampiran 10	Hasil Uji Nilai f^2 (effect size)
Lampiran 11	Hasil Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah fundamental dan kompleks yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan yang layak.¹

Pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global, sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin pertama yang menargetkan penghapusan segala bentuk kemiskinan di mana pun.² Di Indonesia, pengurangan angka kemiskinan menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional.³

Tantangan pengentasan kemiskinan ini terlihat jelas di tingkat regional khususnya provinsi Aceh. Meskipun Provinsi Aceh mengalami tren positif dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan serta kesehatan, angka kemiskinan justru tetap stagnan dan berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Aceh mencapai

¹ M. Rezki Oktavianoor, "Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 2, 2025, h. 174.

² M. Rezki Oktavianoor, "Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, h. 174.

³ Zikram Fabela Dan Arin Khairunnisa, "Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 6, 2024, h. 3161

14,23%, yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.⁴ Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembangunan, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Secara teoritis, terdapat dua variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM.⁵ Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu periode waktu, yang dipandang sebagai kunci utama dalam pengurangan kemiskinan.⁶

Pertumbuhan yang tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif, artinya pertumbuhan yang tinggi belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, yang dapat mengakibatkan fenomena *jobless growth* atau pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja yang memadai.⁷

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2025*, (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025).

⁵ Nila Anggun Lestari, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di kabupaten Kebumen Tahun 2012-2022 : Pendekatan Analisis autoregressive Distributed Lag (Ardl), *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri (Uin)Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), h. 8

⁶ Ahmad Wasito, "Exploring Amartya Sen's Capability Approach: Insights from Climate Change Adaptation in Indonesia," *Peradaban Journal of Economic and Business*, Vol. 2, No. 2 2023, h. 125

⁷ Mira Hastin Dan Ferry Siswadhi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Sakti*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator fundamental yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kualitas hidup melalui tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.⁸ IPM yang tinggi dipandang sebagai modal manusia (*human capital*) yang krusial untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural.⁹ Peningkatan IPM berhubungan positif terhadap penguatan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar kerja, sehingga individu dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf ekonominya.¹⁰

Dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dengan kemiskinan seringkali tidak berjalan langsung. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, muncul sebagai variabel perantara yang krusial.¹¹ Pengangguran tidak hanya menjadi masalah ketenagakerjaan semata, tetapi juga mencerminkan kualitas dari proses pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia itu sendiri.¹²

⁸ Joni Rudianto, Pengaruh Pembiayaan Syariah, Indeks pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi Dan Tenaga Kerja Terhadap Laju pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia periode 2017-2022, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), h. 42

⁹ Nur Isnaeni Novitasari dan Suharno Arintoko, "Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1, 2021, h. 239

¹⁰ Ita Pingkan Fasnir Rorong, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, 2022, h. 403

¹¹ Ifaturrahmi, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021), *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), h. 11

¹² Titin Agustin Ningsih dkk., "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 3, 2024, h. 2285

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Namun jika pertumbuhan tersebut bersifat padat modal atau tidak inklusif, maka penyerapan tenaga kerja akan terbatas dan pengangguran tetap tinggi.

Begitu juga dengan IPM yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, justru dapat menciptakan pengangguran terdidik yang pada akhirnya tidak berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Pengangguran yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kemiskinan karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka diduga berperan sebagai variabel mediator atau perantara yang menghubungkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dengan kondisi kemiskinan di masyarakat.¹³

Data persentase penduduk miskin tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024 menunjukkan fenomena di mana laju penurunan angka kemiskinan di sebagian besar wilayah berlangsung secara perlahan dan cenderung stagnan.

Tabel I.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	18,49%	18,98%	18,37%	17,92%	17,69%
2	Aceh Singkil	20,20%	20,36%	19,18%	19,15%	19,06%
3	Aceh Selatan	12,87%	13,18%	12,43%	12,10%	12,02%
4	Aceh Tenggara	13,21%	13,41%	12,83%	12,45%	11,99%

¹³ Faturrahman Nasution, Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Islamic Human Development Index, Kemiskinan, Pengangguran (Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. 54

5	Aceh Timur	14,08%	14,45%	13,91%	13,39%	13,26%
6	Aceh Tengah	15,08%	15,26%	14,50%	14,38%	14,27%
7	Aceh Barat	18,34%	18,81%	17,93%	17,86%	17,60%
8	Aceh Besar	13,84%	14,05%	13,38%	13,38%	13,21%
9	Pidie	19,23%	19,59%	18,79%	18,78%	18,59%
10	Bireuen	13,06%	13,25%	12,51%	12,12%	12,10%
11	Aceh Utara	17,02%	17,43%	16,86%	16,64%	16,11%
12	Aceh Barat Daya	15,93%	16,34%	15,44%	15,43%	15,32%
13	Gayo Lues	19,32%	19,64%	18,87%	18,82%	18,30%
14	Aceh Tamiang	13,08%	13,34%	12,61%	12,51%	12,17%
15	Nagan Raya	17,70%	18,23%	17,38%	17,25%	16,94%
16	Aceh Jaya	12,87%	13,23%	12,51%	12,42%	12,25%
17	Bener Meriah	18,89%	19,16%	18,39%	18,31%	18,18%
18	Pidie Jaya	19,19%	19,55%	18,45%	18,40%	18,28%
19	Banda Aceh	6,90%	7,61%	7,13%	7,04%	6,95%
20	Sabang	14,94%	15,32%	14,66%	14,59%	14,58%
21	Langsa	10,44%	10,96%	10,62%	10,53%	10,33%
22	Lhokseumawe	10,80%	11,16%	10,84%	10,73%	10,44%
23	Subulussalam	17,60%	17,65%	16,94%	16,41%	16,38%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 1.1, meskipun terdapat penurunan, angka kemiskinan di wilayah seperti Aceh Singkil tetap tinggi yaitu sekitar 19%, sementara Kota Banda Aceh memiliki angka terendah namun stagnan di angka 6,9%. Rata-rata penurunan kemiskinan di provinsi ini hanya berkisar 0,5–1% per tahun. Penurunan angka kemiskinan ini menjadi masalah karena berbanding terbalik dengan data pertumbuhan ekonomi pada Tabel 1.2 yang menunjukkan tren pemulihan yang signifikan.

Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	0,12%	3,41%	4,20%	4,63%	4,43%
2	Aceh Singkil	-1,01%	3,90%	3,61%	3,52%	3,46%
3	Aceh Selatan	-0,05%	2,46%	3,11%	3,53%	3,21%
4	Aceh Tenggara	-0,17%	1,57%	2,69%	3,04%	3,59%

5	Aceh Timur	1,54%	1,94%	3,73%	2,09%	4,63%
6	Aceh Tengah	-1,18%	3,30%	4,93%	5,60%	4,98%
7	Aceh Barat	1,88%	5,84%	3,28%	4,08%	7,50%
8	Aceh Besar	0,39%	2,44%	3,87%	4,37%	4,95%
9	Pidie	-0,12%	2,63%	3,98%	3,95%	4,15%
10	Bireuen	-1,02%	4,09%	4,35%	4,38%	4,52%
11	Aceh Utara	0,98%	-0,54%	4,69%	0,51%	3,56%
12	Aceh Barat Daya	-0,65%	2,88%	3,87%	3,92%	4,24%
13	Gayo Lues	0,88%	2,32%	3,51%	3,98%	3,26%
14	Aceh Tamiang	0,42%	0,88%	3,27%	2,25%	4,25%
15	Nagan Raya	3,36%	4,26%	3,17%	6,83%	4,38%
16	Aceh Jaya	-0,62%	2,59%	3,68%	4,15%	3,83%
17	Bener Meriah	0,09%	3,42%	3,42%	5,22%	3,27%
18	Pidie Jaya	-0,79%	2,03%	3,57%	4,24%	4,55%
19	Banda Aceh	-3,39%	5,51%	5,23%	5,06%	6,08%
20	Sabang	-1,29%	2,67%	2,57%	2,96%	4,16%
21	Langsa	-1,12%	3,92%	4,78%	4,22%	4,43%
22	Lhokseumawe	-1,80%	3,84%	4,01%	4,21%	4,46%
23	Subulussalam	1,97%	3,87%	4,12%	4,06%	4,12%

Sumber: BPS

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas wilayah telah beranjak dari pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 menuju pertumbuhan positif yang stabil di kisaran 3% hingga 6% pada 2024. Misalnya, Kabupaten Aceh Barat yang mencapai 7,50% pada tahun 2024, sementara Kota Banda Aceh mencapai 6,08%. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan, yang mengindikasikan terjadinya fenomena *jobless growth*.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada capaian indeks pembangunan manusia pada tabel 1.3 yang menunjukkan IPM yang terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya di seluruh kota/kabupaten.

Tabel I.3 Data Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	67,90%	68,29%	69,17%	69,98%	70,95%
2	Aceh Singkil	69,92%	70,21%	70,61%	71,14%	71,76%
3	Aceh Selatan	69,79%	70,12%	70,56%	71,14%	71,82%
4	Aceh Tenggara	71,21%	71,28%	72,18%	72,93%	73,59%
5	Aceh Timur	69,02%	69,22%	70,13%	70,73%	71,29%
6	Aceh Tengah	75,07%	75,20%	75,79%	76,45%	77,27%
7	Aceh Barat	73,11%	73,41%	74,09%	74,62%	75,45%
8	Aceh Besar	75,00%	75,03%	75,44%	75,98%	76,57%
9	Pidie	71,92%	71,99%	72,49%	72,95%	73,60%
10	Bireuen	73,22%	73,27%	74,10%	74,56%	75,39%
11	Aceh Utara	70,95%	71,08%	71,85%	72,50%	73,35%
12	Aceh Barat Daya	69,12%	69,37%	69,79%	70,47%	71,16%
13	Gayo Lues	69,06%	69,42%	70,12%	70,82%	71,75%
14	Aceh Tamiang	70,87%	71,12%	72,08%	73,02%	74,00%
15	Nagan Raya	70,54%	70,67%	71,46%	72,15%	73,10%
16	Aceh Jaya	71,30%	71,39%	71,92%	72,44%	73,40%
17	Bener Meriah	74,54%	74,84%	75,46%	76,06%	76,58%
18	Pidie Jaya	74,44%	74,84%	75,59%	76,04%	76,39%
19	Banda Aceh	87,06%	87,36%	87,92%	88,32%	88,85%
20	Sabang	76,96%	77,29%	78,03%	78,70%	79,50%
21	Langsa	79,30%	79,58%	79,96%	80,50%	80,96%
22	Lhokseumawe	78,65%	78,92%	79,38%	80,26%	80,89%
23	Subulussalam	67,39%	67,75%	68,72%	69,66%	70,64%

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel 1.3, di tahun 2024 Kota Banda Aceh mencapai IPM sebesar 88,85% dan Lhokseumawe 80,89%. Capaian IPM ini termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara teoritis, modal manusia yang berkualitas seharusnya mudah terserap ke dalam pasar kerja dan keluar dari kemiskinan.¹⁴

¹⁴ Ita Pingkan Fasnier Rorong, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, 2022, h. 403

Namun kenyataannya, peningkatan IPM ini masih tidak dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

Data TPT di Aceh mencerminkan adanya ketimpangan daya serap tenaga kerja, terutama di wilayah perkotaan dan pusat industri

Tabel I.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	5,47%	5,71%	6,00%	5,85%	5,50%
2	Aceh Singkil	8,24%	8,36%	6,88%	6,84%	6,44%
3	Aceh Selatan	6,54%	6,46%	4,82%	4,73%	4,56%
4	Aceh Tenggara	5,72%	6,43%	5,09%	5,00%	4,79%
5	Aceh Timur	7,26%	7,13%	8,07%	8,03%	7,75%
6	Aceh Tengah	3,05%	2,61%	4,44%	4,42%	4,21%
7	Aceh Barat	7,30%	7,09%	6,09%	6,07%	5,58%
8	Aceh Besar	7,62%	7,70%	8,28%	8,17%	7,93%
9	Pidie	6,45%	7,28%	5,94%	5,92%	5,74%
10	Bireuen	4,12%	4,32%	4,20%	4,14%	3,93%
11	Aceh Utara	8,56%	8,31%	7,08%	7,07%	6,88%
12	Aceh Barat Daya	3,93%	4,04%	4,12%	4,08%	3,83%
13	Gayo Lues	2,01%	1,84%	2,70%	2,65%	2,40%
14	Aceh Tamiang	7,97%	5,87%	7,38%	7,21%	6,95%
15	Nagan Raya	5,11%	4,99%	5,84%	5,74%	5,22%
16	Aceh Jaya	4,08%	3,47%	3,12%	2,88%	2,75%
17	Bener Meriah	1,35%	1,24%	2,61%	2,45%	2,20%
18	Pidie Jaya	6,58%	3,57%	4,40%	4,34%	3,82%
19	Banda Aceh	9,54%	8,94%	8,62%	8,03%	7,55%
20	Sabang	4,81%	3,56%	4,01%	3,92%	2,95%
21	Langsa	9,75%	7,21%	7,85%	7,73%	7,34%
22	Lhokseumawe	11,99%	11,16%	9,15%	8,78%	8,47%
23	Subulussalam	6,93%	6,26%	5,75%	5,69%	5,12%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 1.4, pada tahun 2024 angka pengangguran tertinggi masih didominasi oleh wilayah seperti Lhokseumawe sebesar 8,47%, Aceh Besar sebesar 7,93%, dan Banda Aceh sebesar 7,55%. Sebaliknya, wilayah

dengan basis ekonomi pertanian cenderung memiliki TPT lebih rendah, seperti Bener Meriah yang tingkat penganggurannya sebesar 2,20% dan Gayo Lues sebesar 2,40%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan jika tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa TPT berperan sebagai penghubung yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM dapat benar-benar menurunkan kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh tetapi tidak menciptakan lapangan kerja, atau ketika kualitas SDM meningkat tetapi tidak terserap pasar kerja, maka kemiskinan akan tetap stagnan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM diikuti dengan penurunan TPT dengan penciptaan lapangan kerja, maka barulah kemiskinan dapat turun secara signifikan.

Penelitian mengenai kemiskinan di Indonesia secara konsisten menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai instrumen krusial dalam menekan angka kemiskinan. Mayoritas studi, termasuk hasil riset Ikhsanudin Sukron dan Ach Yasin pada tahun 2021 serta Sesar Apriliyanto pada tahun 2024, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui IPM memberikan dampak negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jabodetabek, hingga Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, pada penelitian yang dilakukan oleh Tina Angelia pada tahun 2025 di Sumatera Utara dan

Retna Ningsih di tahun 2025 di Lampung, di mana IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, sementara faktor lain seperti upah minimum justru menjadi variabel yang lebih dominan dalam memengaruhi kemiskinan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan ketidakkonsistenan yang tajam antarwilayah. Sebagian peneliti menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi efektif menurunkan kemiskinan, namun banyak studi lain seperti yang dilakukan Norma Rosyidah dan Lutfiyah pada tahun 2025 di Kabupaten Brebes dan NTT justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mampu mengurangi angka kemiskinan. Bahkan, di kawasan Jabodetabek, Chairul Anwari pada tahun 2024 menemukan temuan paradoks di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang menghalangi masyarakat miskin untuk menikmati hasil pembangunan.

Variabel pengangguran umumnya terbukti memperburuk tingkat kemiskinan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Maulana Zakaria Ahmad pada tahun 2025 dan Chairul Anwari di tahun 2024. Sedangkan, Aslam Jumain di tahun 2025 menunjukkan bahwa pengangguran tidak mampu memoderasi pengaruh IPM maupun pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Dinamika pengangguran itu sendiri dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kualitas sumber daya manusia. Selvi Saputri dan Yefriza pada tahun 2025

menemukan bahwa di Kepulauan Riau, kenaikan upah minimum justru berpotensi meningkatkan pengangguran, sedangkan penguatan IPM tetap menjadi solusi efektif untuk menurunkannya.

Kesenjangan hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dengan kemiskinan bersifat kompleks dan tidak selalu berjalan langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap mekanisme yang lebih lengkap dengan memasukkan TPT sebagai variabel perantara yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan IPM dengan kemiskinan.

Kebaruan penelitian terletak pada pengujian peran TPT sebagai perantara yang jarang digunakan dalam penelitian skala regional. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur tentang kemiskinan dan ketenagakerjaan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengambil kebijakan di Provinsi Aceh dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek penciptaan lapangan kerja sebagai mekanisme kunci dalam proses pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh” untuk mengungkap secara mendalam dinamika hubungan antar variabel tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan kesenjangan empiris yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini, antara lain:

1. Pada periode tahun 2020–2024, Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh secara umum mengalami pemulihan dari tren negatif menuju positif (seperti Kabupaten Aceh Barat yang naik hingga 7,50% di tahun 2024), sedangkan angka kemiskinan di wilayah tersebut cenderung stagnan dan bertahan di angka yang tinggi.
2. Pada periode tahun 2020–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun laju penurunan angka kemiskinan di provinsi ini berjalan sangat lambat, hanya berkisar 0,5%–1% per tahun.
3. Pada tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh meningkat signifikan menjadi 6,08%, sedangkan angka kemiskinannya justru stagnan di angka 6,95% yang berbanding terbalik dengan teori pertumbuhan ekonomi.
4. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh (88,85%) dan Kota Lhokseumawe (80,89%) masuk kategori sangat tinggi, diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga mendominasi sebagai yang tertinggi di Provinsi Aceh (7,55% dan 8,47%).

5. Pada periode tahun 2020–2024, tren Pertumbuhan Ekonomi yang positif dan stabil di kisaran 3%–6% di berbagai wilayah Aceh tidak diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan, sehingga mengindikasikan terjadinya fenomena *jobless growth*.
6. Pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues terus meningkat diikuti dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah (2,20% dan 2,40%), namun angka kemiskinannya masih berada pada level yang sangat tinggi yaitu 18,18% dan 18,30%.
7. Pada periode tahun 2020–2024, pergerakan naik-turunnya angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh diduga kuat tidak hanya dipengaruhi secara langsung oleh Pertumbuhan Ekonomi dan IPM, melainkan terdapat sumbatan transmisi yang harus diperantarai oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan membatasi ruang lingkup pembahasan maka penelitian ini hanya akan membahas dua variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dan satu variabel mediator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, serta satu variabel terikat yaitu Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan jenis data panel, yang merupakan gabungan antara data antar ruang (*cross-section*) dan data runtun waktu (*time series*). Ruang lingkup wilayah penelitian mencakup 23

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu 2020-2024.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional Variabel adalah penjelasan dari variabel yang dipilih oleh peneliti. Definisi operasional variabel ini menjelaskan secara rinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, termasuk indikator dan skala pengukurannya, guna menghindari interpretasi yang berbeda.¹⁵ Penelitian ini berjudul Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh. Mekanisme operasional tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukur
1	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.	Persentase Penduduk Miskin ¹⁶	Rasio
2	Pertumbuhan ekonomi (X1)	Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang.	Persentase Perubahan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan ¹⁷	Rasio
3	Indeks Pembangunan Manusia(X2)	Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran nilai gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata suatu	Persentase Indeks	Rasio

¹⁵ Dameria Sinaga, *Buku Ajar metodologi Penelitian*, (Jakarta: UKI Press, 2022), h. 26

¹⁶ Yuvanda Sesarria, *dkk., Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, (Jambi: Unja Publisher, 2025), h. 3

¹⁷ Ajeng Entaresmen, *dkk., Ekonomika Makro Pengantar*, (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 21

		negara atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Pembangunan Manusia ¹⁸	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka(Z)	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Persentase tingkat Pengangguran terbuka ¹⁹	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024?

¹⁸ Ita Pingkan Fasnier Rorong, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, h. 403

¹⁹ Titin Agustin Ningsih dkk., "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 3, h. 2285

4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
5. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
7. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh periode 2020-2024?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

6. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

G. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Aceh bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM yang tinggi, tetapi juga harus memastikan terciptanya lapangan kerja yang luas guna menekan angka pengangguran, sehingga manfaat pembangunan dapat secara nyata dirasakan oleh masyarakat miskin.
2. Bagi Mahasiswa/Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris mengenai penggunaan variabel mediator dalam analisis ekonomi makro. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai sejauh mana kualitas modal manusia dan aktivitas ekonomi

mampu menekan angka kemiskinan ketika penyerapan tenaga kerja menjadi variabel mediator (perantara), sehingga dapat memotivasi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di masa depan.

3. Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam mengetahui bagaimana keadaan dinamika kemiskinan di Aceh, serta mengetahui peran dan dampak dari variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dalam mengurangi kemiskinan melalui jalur Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
4. Bagi Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, sehingga dapat memperkaya kekayaan ilmiah penelitian di bidang ekonomi, khususnya bagian regional.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang didalamnya mengkaji dan membahas mengenai kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang dimana didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik analisis data dan alur penggunaan aplikasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, uraian hasil yang didapat dari pengolahan data-data yang ditemukan, ini berkaitan dengan hasil yang diperkirakan.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum dalam ekonomi.²⁰ Kemiskinan juga sering dipahami sebagai kekurangan finansial dan materi yang menghambat seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.²¹ Kemiskinan tidak sekadar dipandang sebagai kekurangan uang dan materi, melainkan sebuah fenomena multidimensi yang mencakup lima dimensi utama, antara lain

- 1) Kemiskinan (*proper*), merujuk pada kekurangan harta benda dan pendapatan secara langsung.
- 2) Ketidakberdayaan (*powerless*) keadaan di mana seseorang merasa tidak mampu atau tidak memiliki kendali atas hidup dan lingkungannya.
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), keterbukaan atau risiko tinggi untuk jatuh ke dalam kesulitan

²⁰ Ema Marsitadewi Komang Dan I. Wayan Sudemen, "Pola Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* , Vol. 9, No. 1, 2025, h. 68

²¹ Mira Hastin Dan Ferry Siswadhi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Sakti*, Vol. 10, No. 1, h. 7

parah akibat guncangan atau krisis misalnya sakit, bencana, atau kehilangan pekerjaan.

- 4) Ketergantungan (*dependence*), keadaan harus bergantung pada orang lain atau pihak luar untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar.
- 5) Keterasingan (*isolation*), merujuk pada pemisahan atau marginalisasi seseorang, baik dari segi lokasi atau geografis maupun dari jaringan sosial dan masyarakat atau sosiologis.²²

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang mencakup rendahnya pendapatan dan konsumsi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, kerentanan dan keterpaparan terhadap risiko, tidak adanya kekuatan dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya kemampuan berpartisipasi.²³

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²⁴ Hak-hak dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan,

²² Mira Hastin Dan Ferry Siswadi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," h. 7

²³ Cut Nurul Aidha, Dkk., *Indeks Kemiskinan Multidimensi 2015–2018 Indonesia*, (Jakarta Selatan: Prakarsa, 2020), h. 8

²⁴ Bps, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023*, Vol. 15, (Bps, 2023), h. 58

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.²⁵

b. Jenis-jenis Kemiskinan

Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, kemiskinan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis.

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.²⁶ Konsep ini bersifat tetap dan tidak tergantung pada standar hidup masyarakat sekitarnya.²⁷

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.²⁸ Seseorang tergolong miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

²⁵ Bps, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023*, h. 58

²⁶ Nur Ajizah Dan Muhammad Nizhar, *Mikro Dan Makro Prespektif Islam*, (Pasuruan: Universitas Yudhantara, 2017), h. 17

²⁷ Nur Ajizah Dan Muhammad Nizhar, *Mikro Dan Makro Prespektif Islam*, h. 17

²⁸ Nur Ajizah Dan Muhammad Nizhar, *Mikro Dan Makro Prespektif Islam*, h. 7

kondisi masyarakat di sekitarnya.²⁹ Kemiskinan relatif bersifat dinamis dan tergantung pada kondisi ekonomi suatu wilayah.³⁰

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada kemiskinan yang terjadi karena adanya faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang mengikat seseorang atau masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.³¹ Kemiskinan kultural disebabkan oleh nilai-nilai, Norma, dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi yang melanggengkan kemiskinan.³²

4) Kemiskinan Stuktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.³³ Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.³⁴

²⁹ Vinny Dw Melliny, *dkk.*, "Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Tengah", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 2023, h. 3

³⁰ Vinny Dw Melliny, *dkk.*, "Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Tengah." h. 4

³¹ Nur Palikhah, "Konsep Kemiskinan Kultural," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 15, No. 30, 2016, h. 11

³² Nur alikhah, "Konsep Kemiskinan Kultural." h. 11

³³ Septian Risky Kurniawan dan Made Suparta, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 69

³⁴ Septian Risky Kurniawan dan Made Suparta, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." h. 70

c. Faktor-Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dipicu oleh beberapa faktor fundamental. Secara mikro ada 2 faktor penyebab kemiskinan

1) Ketimpangan kepemilikan sumber daya dan modal

Kemiskinan terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang disebabkan oleh lemahnya penguasaan aset atau faktor produksi. Masyarakat miskin umumnya hanya memiliki akses dan kontrol yang sangat terbatas terhadap modal ekonomi. Keterbatasan landasan ekonomi ini menjadi hambatan besar untuk menghasilkan pendapatan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.³⁵

2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan kerja menyebabkan rendahnya keterampilan individu. Minimnya keahlian ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas kerja, sehingga upah yang diterima di pasar tenaga kerja menjadi sangat minim. Kondisi ini sering kali diperburuk oleh faktor keturunan yang menyebabkan keterbatasan akses ekonomi tersebut terus diwariskan antar-generasi.³⁶

³⁵ Widhian Hardiyanti, *dkk.*, “Analisis Kemiskinan di Kota Besar Pulau Jawa,” *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 8, No. 1, 2021, h. 2

³⁶ Ronal Aprianto dan Irma Idayati, “Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menekan Angka Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 365

Selain faktor ekonomi di atas, terdapat tiga pendekatan sistematis untuk memahami penyebab kemiskinan

1) Pendekatan Sistem

Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan teknologi, dan tekanan demografi.³⁷ Kondisi ini umumnya dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pusat pertumbuhan ekonomi.³⁸

2) Model Pengambilan Keputusan

Pendekatan ini menyoroti keterbatasan individu dalam aspek pengetahuan dan inovasi. Kemiskinan terjadi karena masyarakat kurang memiliki keterampilan untuk mengelola peluang ekonomi secara mandiri dan cenderung hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja yang disediakan pihak lain atau pemerintah.³⁹

3) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam tatanan sistem ekonomi.⁴⁰

³⁷ Rd Siti Sofro Sidiq, "Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Reformasi*, Vol. 10, No. 2, 2020, h.6

³⁸ Rd Siti Sofro Sidiq, "Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan.", h. 7

³⁹ Marta Ayu Saputri dkk., "Strategi Pengentasan Kemiskinan: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025).

⁴⁰ Rini Salman, *Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau, 2018), h. 23

Hal ini terlihat ketika faktor produksi seperti tanah dan teknologi yang hanya dikuasai oleh segelintir kelompok atau pemilik modal besar, sehingga masyarakat luas kehilangan akses untuk berpartisipasi dalam perekonomian secara adil.⁴¹

Secara keseluruhan, faktor-faktor kemiskinan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dimensi manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Rendahnya kualitas sumber daya manusia secara langsung tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, yang kemudian menjadi penghambat individu untuk keluar dari kemiskinan.

Rendahnya akumulasi modal dalam lingkaran setan kemiskinan berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja, yang secara nyata meningkatkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketika pengangguran meningkat, masyarakat kehilangan pendapatan, yang pada akhirnya memperlambat laju Pertumbuhan Ekonomi dan memperluas cakupan kemiskinan di suatu wilayah.

d. Pengukur dan Indikator Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan merupakan aspek penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan evaluasi program-program pengentasan

⁴¹ Rini Salman, *Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan*, h. 29

kemiskinan.⁴² Berbagai metode pengukuran kemiskinan telah dikembangkan dengan masing-masing kelebihan dan keterbatasannya.

1) Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan.⁴³ Menurut pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan yang digunakan BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM), merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, yang diwakili oleh 52 jenis komoditi dasar makanan. Dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Paket komoditi non-makanan

⁴² Prayoga Setiawan, *dkk.*, "Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Journal Of Law Administration And Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 163

⁴³ Prayoga Setiawan, *dkk.*, "Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." h. 163

diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.⁴⁴

2) Indikator Kemiskinan

BPS menggunakan 3 indikator utama dalam pengukuran kemiskinan, yaitu:

- a) Persentase penduduk miskin, indikator ini merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- b) Indeks kedalaman kemiskinan, indikator ini mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c) Indeks keparahan kemiskinan, Indeks ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, sensitif terhadap ketimpangan di kalangan penduduk miskin.⁴⁵

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Persentase penduduk miskin

e. Teori-teori Kemiskinan

1) Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu lingkaran

⁴⁴ Samsul Hadi, *dkk.*, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (Bps) Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society (Jiss)*, Vol. 2, No. 1 2024, h. 34

⁴⁵ Samsul Hadi, *dkk.*, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember." h. 36

yang saling terkait dan menyebabkan keadaan miskin tetap bertahan.⁴⁶ Menurut Nurkse, negara miskin adalah miskin karena ia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).⁴⁷ Lingkaran ini mencakup sisi penawaran dimana produktivitas dan investasi rendah, serta sisi permintaan dimana daya beli rendah dan pasar sempit. Akibat kebijakan utamanya adalah perlunya dorongan besar berupa investasi untuk memutus rantai ini.⁴⁸

Teori ini menunjukkan Rendahnya investasi tidak hanya terjadi pada modal fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan investasi modal manusia (*Human Capital*). Ketika pendapatan rendah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan pun terbatas, yang kemudian memperkuat rantai kemiskinan tersebut. Hal ini selaras dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengukur dimensi pendidikan dan kesehatan, di mana rendahnya IPM memperburuk siklus kemiskinan dan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) karena kurangnya keterampilan kerja.

⁴⁶ Alvira Lokahita Sirait Dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur," *Independent: Journal Of Economics*, Vol. 2, No. 3, 2022, h. 125

⁴⁷ Alvira Lokahita Sirait Dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur." h. 125

⁴⁸ Alvira Lokahita Sirait Dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur." h. 126

2) Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya investasi pada modal untuk sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan.⁴⁹ Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan seseorang di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengeluarkan individu dari kemiskinan.⁵⁰

Teori Modal Manusia memberikan penjelasan mikro mengapa individu sulit memutus rantai tersebut. Rendahnya modal manusia menyebabkan individu kehilangan kapabilitas (*Capabilities*) untuk bersaing di pasar kerja. Pada penelitian ini, teori ini mendukung peran IPM sebagai faktor kunci untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan *human capital*.

3) Teori Capabilities dan Entitlements

Amartya Sen mengembangkan pendekatan yang lebih luas, memandang kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga kegagalan dalam mencapai *capabilities* atau kemampuan dasar untuk berfungsi dalam masyarakat seperti

⁴⁹ Nazwa Akhaza Hani, *dkk.*, "Peran Human Capital Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Sebuah Analisis Deskriptif," *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 2025, h. 91

⁵⁰ Nazwa Akhaza Hani, *dkk.*, "Peran Human Capital Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Sebuah Analisis Deskriptif." h. 92

menjadi sehat atau teredukasi.⁵¹ Kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiliki hak atau akses *entitlements* atau hak yang seharusnya didapatkan yang cukup untuk memperoleh sumber daya guna mencapai kemampuan dasarnya.⁵²

Teori ini menjadi pelengkap bagi kedua teori sebelumnya. Sen berargumen bahwa meskipun modal manusia tersedia, kemiskinan akan tetap ada jika individu tidak memiliki hak atau akses untuk menggunakan kemampuan tersebut guna memutus lingkaran setan kemiskinan. Teori ini langsung terkait dengan IPM, yang berbasis pada *capability approach*, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengurangi TPT dan kemiskinan secara keseluruhan.

f. Kemiskinan Dalam Prespektif Islam

1) Pengertian Kemiskinan Dalam Islam

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekadar fenomena ekonomi semata, melainkan sebagai kondisi sosial yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat.⁵³ Dalam Islam, kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori, yakni *faqir* (kefakiran) dan miskin (kemiskinan).

⁵¹ Ahmad Wasito, "Exploring Amartya Sen's Capability Approach: Insights From Climate Change Adaptation In Indonesia," *Peradaban Journal Of Economic And Business*, Vol. 2, No. 2 2023, h. 125

⁵² Wasito, "Exploring Amartya Sen's Capability Approach." h. 126"

⁵³ A. Jajang W. Mahri dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-bank Indonesia, 2021),h. 205

Faqir merujuk pada individu yang sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan atau harta yang memadai, sementara miskin menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.⁵⁴

Kemiskinan dalam perspektif Islam diukur berdasarkan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan *Nishab*, yang digunakan sebagai ambang batas kewajiban zakat sekaligus menjadi tolak ukur batas kecukupan harta seseorang. Kedua, pendekatan *Had al-Kifayah*, yakni garis kecukupan minimum yang mencakup kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, meliputi pemenuhan pangan, sandang dan papan, pendidikan, serta kemampuan menunaikan kewajiban ibadah.⁵⁵ Seseorang dikategorikan miskin menurut standar syariah apabila pendapatan atau hartanya berada di bawah *had al-kifayah* tersebut, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan.

2) Penyebab Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan dalam islam tidak terjadi begitu saja. Fenomena ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang

⁵⁴ M. Abzar Duraesa, *Kemiskinan Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2021), h. 10

⁵⁵ M. Abzar Duraesa, *Kemiskinan Di Indonesia*, h. 19

mempengaruhinya. Berikut adalah faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam islam:

a) Faktor Internal

Faktor internal kemiskinan dalam Islam berkaitan erat dengan kondisi dan perilaku individu itu sendiri. Islam secara tegas mengecam sikap malas (*al-kasal*), keengganan bekerja, serta ketergantungan pada belas kasihan orang lain tanpa disertai upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW menegaskan bahwa bekerja adalah kewajiban mulia yang derajatnya setara dengan ibadah, sehingga seseorang yang membiarkan dirinya dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi tanpa berusaha dipandang telah mengabaikan tanggung jawab syariah.⁵⁶

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari lemahnya kompetensi, minimnya keterampilan kerja, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan, turut menjadi penyebab utama ketidakmampuan individu dalam memperoleh penghidupan yang layak. Islam mendorong setiap individu untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri sebagai bagian dari ikhtiar yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.⁵⁷

⁵⁶ A. Jajang W. Mahri dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-bank Indonesia, 2021),h.212

⁵⁷ A. Jajang W. Mahri dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, h. 213.

b) Faktor Eksternal

Islam juga mengakui bahwa kemiskinan juga terjadi akibat ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. Ketimpangan distribusi kekayaan, penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, serta tersumbatnya akses kelompok lemah terhadap modal, lapangan kerja, dan layanan publik merupakan bentuk-bentuk kezaliman ekonomi yang secara tegas dikecam oleh syariah.⁵⁸

Kondisi ini diperparah ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak diikuti oleh pemerataan manfaat yang proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kemakmuran hanya berputar di kalangan kelompok tertentu saja. Ketidakadilan struktural semacam ini menjadikan kemiskinan bukan semata persoalan individual, melainkan sebuah persoalan sistemik yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.⁵⁹

3) Solusi Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan

Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan, baik melalui mekanisme berbagi kekayaan maupun melalui pemberdayaan ekonomi umat

⁵⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 131

⁵⁹ Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 132

secara langsung. Instrumen utama yang ditawarkan Islam untuk memutus rantai kemiskinan adalah optimalisasi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).⁶⁰

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat ibadah sekaligus berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, yakni mengalirkan harta dari golongan yang mampu kepada mereka yang berhak menerima, terutama kaum fakir dan miskin. Infaq dan sedekah bersifat sukarela namun memiliki jangkauan yang lebih luas dan fleksibel dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.⁶¹

Adapun wakaf produktif berperan sebagai sumber manfaat jangka panjang yang dapat menyediakan modal usaha, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sarana ekonomi lainnya bagi masyarakat kurang mampu. Apabila keempat instrumen ini dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran, maka ZISWAF dapat menjadi pilar utama perlindungan sosial berbasis syariah yang nyata dan berkelanjutan.⁶²

Islam juga menempatkan bekerja (*al-kasb*) sebagai kewajiban yang melekat pada setiap individu yang mampu. Membiarkan diri menganggur tanpa alasan yang dibenarkan syariah dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung

⁶⁰ M. Zainul Wathani dkk., *Manajemen Ekonomi ZISWAF* (Penamuda Media, 2023), h. 2

⁶¹ M. Zainul Wathani dkk., *Manajemen Ekonomi ZISWAF*, h. 4

⁶² M. Zainul Wathani dkk., *Manajemen Ekonomi ZISWAF*, h. 5

jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, negara dan lembaga-lembaga ekonomi Islam memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tersedianya lapangan kerja, mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif berbasis nilai Islam, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok yang membutuhkan.⁶³

Dengan memadukan penyaluran ZISWAF yang tepat sasaran dengan upaya pemberdayaan kerja yang nyata, Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan tidak hanya meringankan beban jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.⁶⁴

Ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi menurut para ahli

- 1) Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-

⁶³ M. Zainul Wathani dkk., *Manajemen Ekonomi ZISWAF*, h. 193

⁶⁴ Christo Fanre Parlindungan Sembiring dan Ida Bagus Putu Purbadarmaja, "Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment dan Pendapatan Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 5, no. 1 (2026).

barang ekonomi kepada penduduknya, didukung oleh kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan.⁶⁵

- 2) Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas produktif suatu perekonomian dalam jangka panjang untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin meningkat, diukur dengan kenaikan GDP riil atau GNP riil per kapita.⁶⁶
- 3) N. Gregory Mankiw mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan dalam *Gross Domestic Product* (GDP) riil dari waktu ke waktu, yang berhubungan langsung dengan standar hidup masyarakat.⁶⁷

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional atau output agregat dalam jangka panjang. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian, keduanya adalah hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada aspek peningkatan angka. Sedangkan pembangunan

⁶⁵ Pinky Hamdhan Sari, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Di Indonesia Periode 2012-2023, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025), h. 56

⁶⁶ Fitri Amalia, *dkk., Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 7

⁶⁷ M. Mashabi Dan Wasiaturrahma, "Analysis Of The Effect Of Electronic-Based Payment Systems And Economic Growth In Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 102

ekonomi berfokus pada aspek peningkatan kesejahteraan dan perubahan struktur.⁶⁸

b. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan nilai *output* agrerat suatu perekonomian dari waktu ke waktu.⁶⁹ Mengukur pertumbuhan ekonomi untuk tingkat daerah akan menggunakan konsep produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah indikator pengukur kinerja ekonomi suatu daerah.⁷⁰ PDRB dihitung berdasarkan dua metode harga yang berbeda yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.⁷¹

1) PDRB Atas Harga Berlaku

PDRB atas harga berlaku adalah nilai barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut.⁷² Perhitungan ini mencerminkan nilai nominal tanpa disesuaikan dengan inflasi.⁷³

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa

⁶⁸ Sarahfina, *dkk.*, "Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 489

⁶⁹ Sarahfina, *dkk.*, "Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi." h. 492

⁷⁰ Sarahfina, *dkk.*, "Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi." h. 492

⁷¹ Sarahfina, *dkk.*, "Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi." h. 492

⁷² Sang Ketut Ari Ardiawan Dan Made Suyana Utama, "Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Journal Of Business, Finance, And Economics (Jbfe)*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 7

⁷³ Sang Ketut Ari Ardiawan Dan Made Suyana Utama, "Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." h.7

yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu.⁷⁴

Ini mencerminkan nilai riil atau volume produksi karena telah dibersihkan dari pengaruh inflasi. Perhitungan ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dan untuk membandingkan kinerja ekonomi dari tahun ke tahun tanpa distorsi harga.⁷⁵

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan *Pro Poor* (*Pro Poor Growth Theory*)

Teori pertumbuhan *pro poor* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus secara spesifik menguntungkan kelompok miskin.⁷⁶ Pertumbuhan dikatakan *pro poor* jika pendapatan kelompok miskin meningkat lebih cepat daripada kelompok non miskin, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara bersamaan.⁷⁷

Pertumbuhan *pro poor* terjadi ketika tingkat kemiskinan berkurang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.⁷⁸ Terdapat dua pendekatan dalam mengukur

⁷⁴ Luluk Maziyah, "Analisis Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Teknik Ukur Kinerja Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021).

⁷⁵ Sang Ketut Ari Ardiawan Dan Made Suyana Utama, "Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." h. 7

⁷⁶ Gemechu Bekana Fufa, "Determinants Of Pro-Poor Growth And Its Impacts On Income Share: Evidence From Ethiopian Time Series Data," *The Scientific World Journal*, Vol. 2021, No. 1, 2021, h. 27

⁷⁷ Gemechu Bekana Fufa, "Determinants Of Pro-Poor Growth And Its Impacts On Income Share: Evidence From Ethiopian Time Series Data," h. 27

⁷⁸ Ahmad Murjani, "Pro-Poor Curves And Pro-Poor Growth Index: Case Study In South Kalimantan Province," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 158

pertumbuhan *pro poor*: pendekatan absolut yang menekankan peningkatan pendapatan kelompok miskin tanpa memperhatikan distribusi, dan pendekatan relatif yang menekankan bahwa pendapatan kelompok miskin harus tumbuh lebih cepat daripada rata-rata pendapatan masyarakat.

⁷⁹

Syarat pertumbuhan ekonomi yang *pro poor* menurut Klasen yaitu, pertumbuhan yang padat karya untuk menyerap tenaga kerja, pertumbuhan yang terdistribusi secara geografis hingga ke daerah-daerah terpencil, didukung oleh investasi pada modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan, dan adanya sistem perlindungan sosial yang memadai.⁸⁰ Teori ini relevan karena menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan IPM dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, di mana investasi modal manusia memutus lingkaran setan kemiskinan.

2) Teori *Trickle Down effect*

Teori Trickle Down Effect yang dikembangkan oleh ekonom klasik menyatakan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menetes ke bawah dan

⁷⁹ Ahmad Murjani, "Pro-Poor Curves And Pro-Poor Growth Index: Case Study In South Kalimantan Province," h. 158

⁸⁰ Ferry Prasetya, "Kualitas Pemerintahan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 22

menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.⁸¹ Mekanisme transmisinya terjadi melalui:

- a) Penciptaan lapangan kerja baru seiring ekspansi ekonomi
- b) Peningkatan upah akibat meningkatnya permintaan tenaga kerja
- c) Peningkatan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk program sosial⁸²

Akan tetapi, kritik terhadap teori ini muncul karena pada kenyataannya manfaat pertumbuhan tidak selalu tersebar merata. Bourguignon menjelaskan bahwa efek *trickle down* tidak bekerja secara otomatis dan memerlukan kebijakan redistributif yang tepat untuk memastikan kelompok miskin dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.⁸³ Teori ini sering dikritik sebagai pendahulu teori inklusif, di mana tanpa intervensi, pertumbuhan hanya memperburuk kemiskinan struktural dan TPT, kecuali didukung oleh peningkatan IPM untuk akses yang lebih adil.

3) Teori Pertumbuhan Inklusif

Teori pertumbuhan inklusif berkembang sebagai respons

⁸¹ Putri Aulia Rosmayani Dkk., “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 3, No. 4, 2022, h. 601

⁸² Astari Lutviana Devi, “Analisis Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pengembangannya Dalam Perspektif Model Penta Helix” (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), h. 2

⁸³ Aris Soelistyo Dan Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, “Econometry Model Of The Impact Of Macropprudential Policy On Poverty In Indonesia,” *Journal Social Sciences*, Vol. 3, No. 13, 2019, h. 1153

terhadap keterbatasan teori *trickle down*. Menurut Ranieri dan Ramos, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif, artinya manfaat pertumbuhan tersebar luas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.⁸⁴

Ali dan Son mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam dan berkontribusi pada proses pertumbuhan, serta menikmati hasil pertumbuhan secara adil.⁸⁵ Pertumbuhan inklusif mencakup dua dimensi yaitu penciptaan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat dan distribusi manfaat pertumbuhan yang merata.⁸⁶

Karakteristik pertumbuhan inklusif menurut *World Bank* meliputi, pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja produktif, akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pengembangan infrastruktur yang menjangkau daerah terpinggirkan, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dan sistem perlindungan

⁸⁴ Ferry Prasetya, "Kualitas Pemerintahan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 23

⁸⁵ Harijono Imbran dkk., "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* 8, no. 1 (2025).

⁸⁶ Hisdal Jamil, "Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia" (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), h. 3

sosial yang kuat⁸⁷ Teori ini melengkapi *pro poor growth* dengan menekankan integrasi IPM dan penurunan TPT sebagai mekanisme utama untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, selaras dengan teori capabilities yang memandang akses kesempatan sebagai kunci.

3. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah ukuran nilai gabungan yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam dimensi-dimensi dasar pembangunan manusia.⁸⁸ IPM pertama kali dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dengan tujuan untuk menggeser fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata ke pembangunan yang berpusat pada manusia.⁸⁹

IPM didefinisikan sebagai indeks gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.⁹⁰ IPM merupakan indikator penting yang

⁸⁷ Ferry Prasetya, “Kualitas Pemerintahan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur,” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 23

⁸⁸ Dadang Suwanda Dan Nur Handayani, *Grand Design Pembangunan Kependudukan* (Bandung: Bimedia, 2022), h. 18

⁸⁹ Endah Eka Setiawati, “Fuzzy Inference System Metode Mamdani Untuk Memprediksi Ipm Di Kota Langsa,” *Jurnal Media Teknologi Dan Informatika*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 126

⁹⁰ Joni Rudianto, Pengaruh Pembiayaan Syariah, Indeks pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi Dan Tenaga Kerja Terhadap Laju pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia periode 2017-2022, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), h. 42

memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek kesehatan dan pendidikan menurut UNDP.⁹¹

BPS mendefinisikan IPM sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.⁹² IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang mencerminkan kemampuan dasar manusia untuk memperluas pilihan-pilihan mereka.⁹³

b. Pengukuran dan Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan IPM dilakukan melalui beberapa tahapan. Yaitu dilakukan penghitungan indeks untuk setiap dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.⁹⁴ Untuk dimensi pendidikan, indeks dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Setelah ketiga indeks

⁹¹ Endah Eka Setiawati, "Fuzzy Inference System Metode Mamdani Untuk Memprediksi IPM di Kota Langsa." h. 126

⁹² Rudianto, Pengaruh Pembiayaan Syariah, Indeks pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi Dan Tenaga Kerja Terhadap Laju pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia periode 2017-2022, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2024), h.21

⁹³ Rudianto, Pengaruh Pembiayaan Syariah, Indeks pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi Dan Tenaga Kerja Terhadap Laju pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia periode 2017-2022, h. 21

⁹⁴ Ulvianingrum Sholekhah, Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), h. 6

dimensi diperoleh, IPM kemudian dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi tersebut.⁹⁵

Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik pencapaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Menurut BPS, klasifikasi status pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM adalah sebagai berikut:

- a) $IPM < 60$, menunjukkan status pembangunan manusia rendah
- b) $60 \leq IPM < 70$: menunjukkan status pembangunan manusia sedang
- c) $70 \leq IPM < 80$, menunjukkan status pembangunan manusia tinggi
- d) $IPM \geq 80$, menunjukkan status pembangunan manusia sangat tinggi⁹⁶

c. Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan BPS, indikator IPM terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Dimensi kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang

⁹⁵ Bagus Hari Yudanto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali Tahun 2013-2017, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 16

⁹⁶ Bagus Hari Yudanto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali Tahun 2013-2017, h. 17

baru lahir untuk hidup dengan asumsi pola resiko kematian terbesar menurut umur tidak berubah.⁹⁷ Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.⁹⁸

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur menggunakan dua indikator:

- a) Harapan Lama Sekolah (HLS), menunjukkan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS mencerminkan harapan lamanya pendidikan formal yang akan ditempuh oleh anak usia sekolah. Nilai minimum HLS adalah 0 tahun dan nilai maksimum adalah 18 tahun.⁹⁹
- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS mencerminkan kualitas pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Nilai minimum RLS adalah 0 tahun dan nilai maksimum adalah

⁹⁷ Retna Ningsih, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025), h. 24

⁹⁸ Retna Ningsih, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung, h. 24

⁹⁹ Aufa nabila Putri, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Di Provinsi Dki Jakarta Dengan Pengeluaran Pemerintah Sebagai Variabel Intervening" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

15 tahun, yang setara dengan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.¹⁰⁰

3) Dimensi standar Hidup Yang Layak

Dimensi standar hidup yang layak diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan dasar yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.¹⁰¹ Pengeluaran per kapita dihitung dari total pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Data pengeluaran yang digunakan mencakup pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.¹⁰²

d. Teori Indeks Pembangunan Manusia

1) Teori *Capability Approach* (Pendekatan Kemampuan)

IPM didasarkan pada teori *capability approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen.¹⁰³ Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus dinilai berdasarkan perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka

¹⁰⁰ Retna Ningsih, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025), h. 24

¹⁰¹ Sholekhah, "Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia."

¹⁰² Retna Ningsih, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025), h. 24

¹⁰³ Muhammad Giri Ainul Yaqien, *dkk.*, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2, 2024, h. 142

nilai. Pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan substantif yang dinikmati manusia, bukan hanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau peningkatan pendapatan.¹⁰⁴

Kemampuan adalah kebebasan sesungguhnya yang dimiliki seseorang untuk mencapai berbagai kombinasi fungsi yang dapat mereka capai.¹⁰⁵ Fungsi-fungsi ini mencakup hal-hal yang dapat dilakukan atau dicapai seseorang, seperti memiliki kesehatan yang baik, memperoleh pendidikan, atau memiliki standar hidup yang layak. Kemampuan seseorang untuk mencapai fungsi-fungsi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan pengaturan sosial yang ada.¹⁰⁶ Teori ini langsung terkait dengan pengurangan kemiskinan, di mana peningkatan IPM melalui pendidikan dan kesehatan memungkinkan individu memutus lingkaran setan kemiskinan, selaras dengan *human capital theory* dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menurunkan TPT.

2) Teori Pembangunan Manusia

Teori pembangunan manusia yang diusung oleh *Mahbub ul Haq* dan diadopsi oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) menekankan bahwa manusia adalah tujuan akhir

¹⁰⁴ Muhammad Giri Ainul Yaqien, *dkk.*, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023," h. 142

¹⁰⁵ Muhammad Giri Ainul Yaqien, *dkk.*, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023.", h. 143

¹⁰⁶ Muhammad Giri Ainul Yaqien, *dkk.*, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023.", h. 143

dari pembangunan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁷ Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan manusia, yang paling penting adalah untuk hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan menikmati standar hidup yang layak.¹⁰⁸

Teori ini membedakan antara pembentukan kemampuan manusia melalui kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan dengan penggunaan kemampuan tersebut untuk pekerjaan, kegiatan produktif, politik, atau rekreasi.¹⁰⁹ Teori ini melengkapi *capability approach* dengan fokus pada dimensi praktis IPM, di mana peningkatan akses pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan human capital tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi *pro-poor*, sehingga mengurangi TPT dan kemiskinan secara struktural dalam konteks penelitian ini.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu

¹⁰⁷ Nurul Jannah Dkk., “Rethinking Human Development: Contributions Of Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, And Umer Chapra To Conventional And Islamic Indices,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2022, h. 244

¹⁰⁸ Nurul Jannah, dkk., “Rethinking Human Development: Contributions Of Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, And Umer Chapra To Conventional And Islamic Indices,” h. 244

¹⁰⁹ Nurul Jannah, dkk., “Rethinking Human Development: Contributions Of Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, And Umer Chapra To Conventional And Islamic Indices,” h. 245

indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah.¹¹⁰ Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.¹¹¹

Pengangguran terbuka mencakup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.¹¹²

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pengangguran sebagai berikut

- 1) Pengangguran terbuka merupakan seseorang yang telah masuk kedalam penduduk usia kerja yang setelah beberapa lama tidak bekerja, kemudian bersedia menerima pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.¹¹³
- 2) Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai pekerja mandiri atau pekerja yang sedang

¹¹⁰ Jiran Julita, *dkk.*, “Penerapan Radial Basis Function Neural Network Dalam Mengklasifikasikan Kab/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat,” *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 20

¹¹¹ Jiran Julita, *dkk.*, “Penerapan Radial Basis Function Neural Network Dalam Mengklasifikasikan Kab/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat,” h. 46

¹¹² Endah Novianti, Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), h. 20

¹¹³ Oktaviani Syarif, Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 15

berusaha mencari pekerjaan selama periode tertentu karena terpaksa melakukan pekerjaannya yang kurang dari jam kerja pada umumnya atau yang masih mencari pekerjaan lain ataupun yang masih bersedia mencari tambahan pekerjaan.¹¹⁴

- 3) Pengangguran tertutup merupakan situasi di mana seseorang bekerja secara aktif, namun kontribusinya terhadap hasil produksi sangat rendah atau bahkan nol. Jadi, jika seseorang tersebut ditarik atau berhenti dari pekerjaannya, total output atau hasil produksi perusahaan/sektor tersebut tidak akan berkurang.¹¹⁵

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.¹¹⁶ Pengangguran terbuka menggambarkan kondisi dimana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali, berbeda dengan setengah menganggur yang masih memiliki pekerjaan meskipun tidak optimal.¹¹⁷

b. Jenis Jenis Pengangguran

Berdasarkan sifatnya, pengangguran terbagi kedalam 4

¹¹⁴ Oktaviani Syarif, Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 15

¹¹⁵ Nadiva Jihan Almas, Dampak Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 24

¹¹⁶ Angela Nirmala Maria Lumi dkk., “Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 3 (2021).

¹¹⁷ Yuliansyah, “Hubungan Antara Pengangguran Dan Upah Minimum Di Indonesia,” *Cross Border*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 341

golongan, yaitu

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka pada dasarnya merupakan fenomena ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Kondisi ini muncul ketika laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk yang masuk ke dalam usia kerja.¹¹⁸

Fenomena ini menyebabkan akumulasi tenaga kerja yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap pekerjaan, sehingga dalam jangka waktu yang panjang, mereka benar-benar berada di luar aktivitas ekonomi produktif. Kelompok ini disebut menganggur secara nyata karena mereka mencurahkan seluruh waktunya tanpa melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi atau pendapatan.¹¹⁹

2) Setengah Menganggur (*Underemployment*)

Seseorang dikategorikan ke dalam kelompok setengah menganggur apabila mereka telah bekerja namun jumlah jam kerjanya berada di bawah batas normal, yang biasanya ditetapkan sekitar 36 jam per minggu.¹²⁰ Meskipun secara

¹¹⁸ Suci Frisnoiry, dkk., “Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 17, No. 1, 2024, h. 369

¹¹⁹ Frisnoiry dkk., “Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia.”

¹²⁰ Oktaviani Syarif, *Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 15

administratif mereka tergolong sebagai pekerja, kontribusi dan pendapatan yang mereka hasilkan belum optimal karena pemanfaatan waktu kerja yang sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang belum terserap sepenuhnya oleh sistem ekonomi yang ada.¹²¹

3) Pengangguran Tertutup (*disguised unemployment*)

Pengangguran tertutup terjadi ketika jumlah pekerja yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi melebihi kapasitas ideal yang dibutuhkan untuk mencapai hasil produksi yang paling efisien.¹²² Secara teoretis, penambahan tenaga kerja dalam kondisi ini sudah tidak lagi memberikan tambahan nilai pada total produksi, atau dengan kata lain, produktivitas marginalnya sudah berada di bawah nol. Namun, perusahaan atau organisasi sering kali tetap mempertahankan atau menambah tenaga kerja karena pertimbangan sosial, keluarga, atau birokrasi, meskipun secara ekonomi keberadaan pekerja tambahan tersebut tidak meningkatkan hasil produksi.¹²³

4) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang sangat bergantung pada perubahan siklus alam dan fluktuasi

¹²¹ Oktaviani Syarif, Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015, h. 15

¹²² Nadiva Jihan Almas, Dampak Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 24

¹²³ Nadiva Jihan Almas, Dampak Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, h. 24

iklim, terutama pada sektor-sektor primer.¹²⁴ Di sektor pertanian dan perikanan, aktivitas ekonomi sering kali terhenti secara periodik; misalnya, nelayan dan penyadap karet sering kali terpaksa berhenti beroperasi saat intensitas curah hujan terlalu tinggi karena kendala keselamatan dan teknis.¹²⁵ Hal serupa juga dialami oleh para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air; pada musim kemarau panjang yang menyebabkan lahan kering dan sumber irigasi terhenti, mereka tidak memiliki pilihan selain menganggur sementara waktu hingga musim tanam berikutnya tiba.¹²⁶

c. Pengukur Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan menggunakan rumus pengukuran TPT.¹²⁷ Dalam penghitungan TPT, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, yaitu

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.¹²⁸ Angkatan kerja merupakan penjumlahan dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang

¹²⁴ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 93

¹²⁵ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro*, h. 93

¹²⁶ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro*, h. 93

¹²⁷ Rhivna Cilviyanti Rambe dkk., "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 8, no. 1 (2019).

¹²⁸ Endah Novianti, *Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta, 2018), h.21

menganggur.¹²⁹ Konsep angkatan kerja ini sangat penting karena menjadi denominator dalam penghitungan TPT.

2) Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam secara terus menerus dalam seminggu sebelum pencacahan.¹³⁰ Termasuk juga mereka yang punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan seperti sakit, cuti, menunggu panen, atau mogok kerja¹³¹

3) Penduduk Menganggur

Penduduk menganggur terdiri dari,

- a) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan
- b) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha
- c) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa
- d) Mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja¹³²

¹²⁹ Endah Novianti, Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia, h.21

¹³⁰ Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?," *Journal Of Economic Development*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 72

¹³¹ Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?," h. 72

¹³² Endah Novianti, Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), h.21

d. Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

1) Teori Hukum Okun (*Okun's Law*)

Hukum Okun, yang dikembangkan oleh Arthur Okun pada tahun 1962, menjelaskan hubungan empiris antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.¹³³ Terdapat hubungan negatif yang konsisten antara perubahan tingkat pengangguran dan pertumbuhan output riil.¹³⁴ Secara spesifik, hukum ini menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi riil di atas tingkat pertumbuhan potensial akan menurunkan tingkat pengangguran sekitar 0,5 persen.¹³⁵

Hukum Okun tetap relevan hingga saat ini, meskipun koefisien hubungan antara pertumbuhan dan pengangguran dapat bervariasi antar negara dan periode waktu.¹³⁶ Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan-perusahaan akan meningkatkan produksi dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan tingkat pengangguran.

¹³³ Muhammad Adi Nugroho, Implementasi Hukum Okun Di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 20

¹³⁴ Muhammad Adi Nugroho, Implementasi Hukum Okun Di Indonesia, h. 20

¹³⁵ Nuzulaili, "Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020.", h. 234

¹³⁶ Nukta Alfahrunnisa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Di Kalimantan Barat, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024), h. 12

Ketika ekonomi mengalami penurunan atau pertumbuhan yang lambat, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, yang mengakibatkan peningkatan pengangguran.¹³⁷ Teori ini relevan dengan penelitian ini karena menghubungkan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan penurunan TPT, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses pekerjaan, selaras dengan teori *pro-poor growth* dan IPM yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

2) Teori Modal manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia, yang dikembangkan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz, menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sebagai faktor penentu produktivitas tenaga kerja.¹³⁸ Pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.¹³⁹

Investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga mengurangi risiko pengangguran.¹⁴⁰ Individu

¹³⁷ Nukta Alfahrunnisa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Di Kalimantan Barat, h. 12

¹³⁸ Muhammad Hasan, dkk., *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: Cv. Media Sains Indonesia, 2023), h. 3

¹³⁹ Muhammad Hasan, dkk., *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*, h. 3

¹⁴⁰ Muhammad Hasan, dkk., *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*, h. 4

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan memiliki akses yang lebih baik ke informasi tentang peluang kerja. Teori ini melengkapi Hukum Okun dengan fokus pada kualitas SDM, di mana peningkatan IPM melalui dimensi pendidikan dan kesehatan menurunkan TPT dan memutus lingkaran setan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3) Teori Pertumbuhan Inklusif dan Ketenagakerjaan

Teori pertumbuhan inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif, artinya manfaat pertumbuhan harus tersebar luas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.¹⁴¹ Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan memastikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen masyarakat.¹⁴²

International Labour Organization menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah yang

¹⁴¹ Hidsal Jamil, "Less Inclusive Growth In Indonesia? The Unintended Consequences Of Internet Penetration," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 2, 2022, h. 198

¹⁴² Hidsal Jamil, "Less Inclusive Growth In Indonesia? The Unintended Consequences Of Internet Penetration," h. 198

cukup untuk menyerap angkatan kerja.¹⁴³ Pertumbuhan yang tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai akan menghasilkan *jobless growth*, yaitu pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja yang signifikan.¹⁴⁴ Teori ini menghubungkan TPT dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana penurunan pengangguran melalui penciptaan kerja padat karya selaras dengan peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan struktural, sebagai respons terhadap keterbatasan *trickle down effect*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai acuan penting untuk perbandingan dan pengembangan. Pembahasan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan telah dikaji secara luas dengan variasi pada metode, lokasi, dan periode penelitian. Rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ikhsanudin Sukron dan Ach Yasin (Jurnal Ekonomi, 2021)	Pengaruh IPM, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran tidak memiliki pengaruh.

¹⁴³ Oktaviani Syarif, Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 15

¹⁴⁴ Oktaviani Syarif, Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015, h. 15

			Secara simultan, variabel IPM, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2	Norma Rosyidah Dan Lutfiyah (Jurnal Manajemen, 2025)	Analyzing Poverty Reduction Through ZIS, Inflation, and Economic Growth	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ZIS, inflasi, dan PDB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2012-2022
3	Tina Angelia, Fitrah Maya Sari Hasugian, dan Joko Suharianto (Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi, 2025)	Analisis Pengaruh Pengangguran, IPM dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengangguran dan IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, PDRB berpengaruh negatif signifikan, yang berarti peningkatannya dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Sumatera Utara. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan kontribusi 83,63%
4	Sesar Apriliyanto, Syaeful Bakhri, Achmad Otong Busthomi (Jurnal	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh

	Ekonomika, 2024)	Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Brebes Tahun 2013-2022	negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditemukan tidak mampu memediasi pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan.
5	Chairul Anwari, Ambariyanto (Jurnal Neo-Bis, 2024)	Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Jabodetabek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Jabodetabek
6	Aslam Jumain, Agus Tri Basuki (Jurnal Ilmu Ekonomi, 2025)	Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Di Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung terhadap

			variabel tersebut. Meskipun pengangguran memiliki pengaruh langsung yang signifikan, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pengangguran tidak mampu menjadi variabel moderasi (tidak signifikan) dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi maupun IPM terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya angka pengangguran tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh dari variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
7	Marlince Tara Koja, Adrianus Kabubu Hudang, Yuniarti Reny Renggo (Jurnal Ilmiah Global Education, 2024)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
8	Selvi Saputri, Yefriza (Jurnal Darma Agung, 2025)	Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di

		Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
9	Retna Ningsih (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, 2025)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Lampung. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh secara signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
10	Maulana Zakaria Ahmad (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)	Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan di Kota Jawa Timur 2017-2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, pendapatan per kapita dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian oleh ikhsanudin sukon dan

ach yasin yang berjudul pengaruh IPM, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen dan dependen yang digunakan yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di Provinsi Aceh serta periode waktu yang lebih baru. Dari segi model analisis, penelitian ini berbeda karena menempatkan TPT sebagai variabel mediator, sedangkan penelitian ikhsanudin menempatkan IPM, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen yang sejajar.

Pada penelitian oleh Norma Rosyidah dan Lutfiyah yang berjudul *Analyzing Poverty Reduction Through ZIS, Inflation, and Economic Growth*, menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel IPM dalam penelitian ini, serta penggunaan lokasi Provinsi Aceh dibandingkan penelitian Norma yang berskala nasional. Selain itu, sementara Norma memfokuskan pada instrumen ZIS dan Inflasi, penelitian ini berfokus pada mekanisme variable mediator TPT dalam menghubungkan pertumbuhan dan IPM terhadap kemiskinan.

Pada penelitian oleh Tina Angelia yang berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran, IPM dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabelnya berupa pertumbuhan ekonomi (PDRB), Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran (TPT), dan Kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu Provinsi Aceh dan periode penelitian 2020-2024. Selain itu, Tina Angelia menguji pengaruh seluruh variabel secara langsung (*direct effect*), sementara penelitian ini menggunakan TPT sebagai variabel mediator atau perantara untuk melihat hubungan tidak langsung (*indirect effect*).

Pada penelitian oleh Sesar Aprilliyanto, Syaeful Bakhri, dan Achmad Ootong Busthomi yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Brebes Tahun 2013-2022 menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada posisi variabel penelitian, pada penelitian Sesar, pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai variabel *intervening* (mediator) yang menghubungkan IPM terhadap kemiskinan. Penelitian ini menempatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai variabel independen yang sejajar, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediatornya. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian di Kabupaten Brebes sedangkan lokasi penelitian ini di Provinsi Aceh, serta periode waktu penelitian yang lebih baru, yaitu tahun 2020-2024.

Pada penelitian oleh Choirul Anwari dan Ambariyanto yang berjudul Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat

Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kawasan Jabodetabek, menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel-variabel yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di Provinsi Aceh serta periode waktu yang lebih baru, yaitu tahun 2020-2024, dibandingkan wilayah Jabodetabek pada periode 2018-2023. Dari segi model analisis, penelitian ini berbeda karena menempatkan TPT sebagai variabel mediator, sedangkan penelitian Anwari dan Ambariyanto menempatkan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPT sebagai variabel independen yang sejajar dalam mempengaruhi kemiskinan.

Pada penelitian oleh Aslam Jumain dan Agus Tri Basuki yang berjudul Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Moderasi di Sulawesi Selatan , menggunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel-variabel yang diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di Provinsi Aceh serta periode waktu yang digunakan, yaitu tahun 2020-2024. Dari segi model analisis, penelitian ini berbeda secara signifikan dalam menempatkan variabel pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian oleh Aslam Jumain dkk. menempatkan pengangguran sebagai variabel moderasi,

sementara pada penelitian ini, TPT diposisikan sebagai variabel mediator. Selain itu, hasil pada penelitian Aslam Jumain menunjukkan bahwa pengangguran tidak terbukti berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan.

Pada penelitian oleh Marlince Tara Koja, Adrianus Kabubu Hudang, dan Yuniarti Reny Renggo yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur", digunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran, dan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di Provinsi Aceh serta periode waktu yang lebih baru, yaitu tahun 2020-2024, sementara penelitian Koja dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2018-2022. Dari segi model analisis, penelitian ini berbeda karena menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediator, sedangkan penelitian oleh Koja et al. menempatkan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran sebagai variabel independen yang sejajar dalam memengaruhi kemiskinan.

Pada penelitian oleh Selvi Saputri dan Yefriza yang berjudul Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12. Penelitian ini memiliki persamaan pada penggunaan variabel independen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di Provinsi Aceh serta periode waktu yang lebih baru yaitu tahun 2020-2024. Selain itu, terdapat perbedaan pada fokus variabel dependen, di mana penelitian ini menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen utama, sedangkan penelitian Selvi Saputri dan Yefriza berfokus pada Pengangguran sebagai variabel dependen. Dari segi model analisis, penelitian ini berbeda karena menempatkan TPT sebagai variabel mediator untuk melihat pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan, sementara penelitian Selvi Saputri dan Yefriza menempatkan upah minimum, IPM, dan jumlah penduduk sebagai variabel independen yang sejajar dalam memengaruhi pengangguran.

Pada penelitian oleh Retna Ningsih yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung, menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan. Perbedaannya terletak pada variabel tambahan; Retna menggunakan Upah Minimum sementara penelitian ini menggunakan TPT. Perbedaan mendasar lainnya adalah lokasi penelitian ini memilih lokasi penelitian di Provinsi Aceh dan kerangka pemikiran di mana penelitian ini menguji peran TPT sebagai mediator, bukan sekadar variabel independen tambahan.

Pada penelitian oleh Maulana Zakaria Ahmad yang berjudul Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan di Kota Jawa Timur 2017-2024, menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini memiliki persamaan pada penggunaan data panel serta variabel IPM, Pengangguran (TPT), dan Kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan penggunaan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai pengganti Pendapatan Perkapita. Secara metodologis, penelitian ini menguji efek perantara TPT, sedangkan Maulana menguji pengaruh langsung dari ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan baik secara kontekstual maupun metodologis. Kebaruan tersebut terletak pada penggunaan lokus penelitian di Provinsi Aceh dengan periode terbaru dari tahun 2020 hingga 2024, serta penerapan model analisis jalur yang mengintegrasikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediator, bukan sekadar variabel independen yang sejajar atau variabel moderasi seperti pada studi-studi sebelumnya.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) dalam menjelaskan anomali di Provinsi Aceh, di mana pertumbuhan ekonomi dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Dengan menempatkan TPT sebagai mediator, penelitian ini mampu menguji secara

mendalam apakah efektivitas penyerapan tenaga kerja menjadi kendala utama atau justru menjadi jembatan penghubung dalam mendistribusikan hasil pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konsep yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor penting dalam penelitian.¹⁴⁵ Pada penelitian ini variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X2) memengaruhi Kemiskinan (Y) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z) sebagai mediator.

Berdasarkan kerangka teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.¹⁴⁶ Pertumbuhan ekonomi yang stabil mencerminkan peningkatan output nasional yang seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.¹⁴⁷ Sementara itu, IPM yang tinggi menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang menjadi modal utama bagi individu untuk keluar dari jeratan kemiskinan.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 60.

¹⁴⁶ Mira Hastin Dan Ferry Siswadhi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Sakti*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 3

¹⁴⁷ Mira Hastin Dan Ferry Siswadhi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," h. 3

¹⁴⁸ Nur Isnaeni Novitasari dan Suharno Arintoko, "Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1, 2021, h. 239

Namun, hubungan ini seringkali tidak bersifat langsung dan sederhana. Di sinilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berperan sebagai variabel mediator yang menentukan seberapa efektif pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia dalam mengurangi kemiskinan.¹⁴⁹

Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dengan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor riil. Jika ekonomi tumbuh namun tidak mampu menyerap tenaga kerja berdasarkan fenomena *jobless growth*, maka angka pengangguran (TPT) akan tetap tinggi.¹⁵⁰

Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas human capital. Individu dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Tingginya IPM diharapkan dapat menurunkan TPT karena tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.¹⁵¹

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau IPM yang meningkat tidak serta-merta menurunkan kemiskinan jika akses terhadap lapangan kerja tetap sulit. TPT menjadi indikator kunci; jika pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia gagal dikonversi menjadi lapangan kerja nyata, maka upaya pengentasan kemiskinan akan terhambat. Dengan demikian, TPT

¹⁴⁹ Ifaturrahmi, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021), *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), h. 11

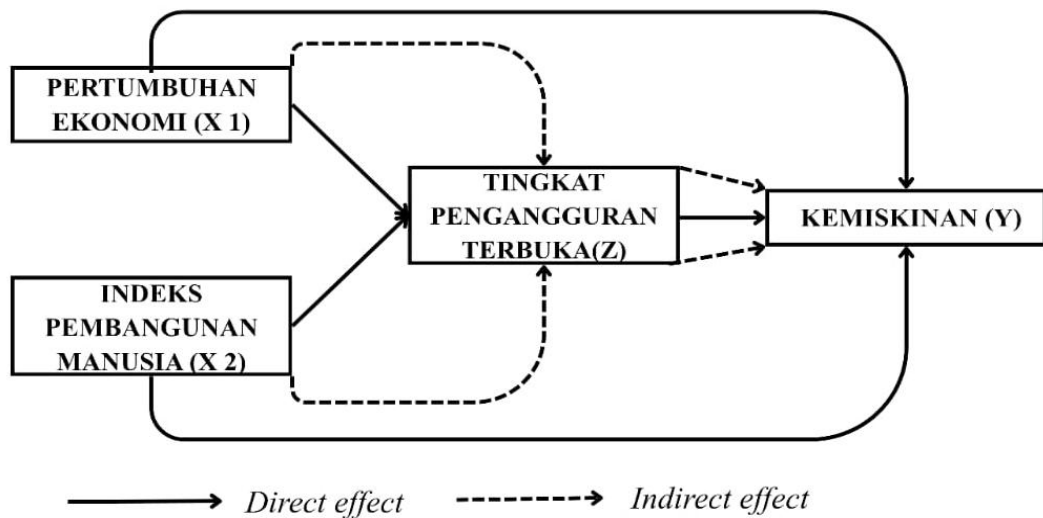
¹⁵⁰ Mira Hastin Dan Ferry Siswadi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Sakti*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 3

¹⁵¹ Ita Pingkan Fasnir Rorong, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, 2022, h. 403

berfungsi sebagai perantara yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel makro tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai pada gambar II.1

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Gambar II.1 di atas menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga menganalisis pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) melalui tingkat pengangguran terbuka. Hal ini bertujuan untuk membuktikan apakah tingkat pengangguran terbuka di Aceh menjadi penghambat atau menjadi variabel perantara sampainya manfaat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap penurunan kemiskinan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian,

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.¹⁵² Hipotesis juga merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.¹⁵³ Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh

H_{a1} : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H₀₂ : Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a2} : Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H₀₃ : Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H_{a3} : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H₀₄ : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

H_{a4} : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

¹⁵² Dodiet Aditya Setyawan, *Modul Hipotesis Dan Variabel Penelitian* (Tahta Media Group, 2021).

¹⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 64

- H₀₅ : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.
- H_{a5} : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.
- H₀₆ : Tingkat pengangguran terbuka tidak mampu sebagai variabel mediator antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
- H_{a6} : Tingkat pengangguran terbuka mampu sebagai variabel mediator antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
- H₀₇ : Tingkat pengangguran terbuka tidak mampu sebagai variabel mediator antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
- H_{a7} : Tingkat pengangguran terbuka mampu sebagai variabel mediator antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh menggunakan dua variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh penelitian ini dimulai November 2025 sampai April 2026.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dasarnya adalah pendekatan yang mengutamakan pembuktian data dengan angka dan harus objektif.¹⁵⁴ Cara kerjanya adalah meneliti sekelompok orang atau sampel, mengumpulkan data menggunakan alat ukur yang sudah baku, lalu menganalisis data itu dengan statistik berupa angka untuk membuktikan apakah dugaan awal atau hipotesis itu benar.¹⁵⁵

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan untuk mencari pengaruh. Pendekatan ini bertujuan mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.¹⁵⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) berbasis variasi atau perubahaman nilai yang diestimasi dengan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)*. Analisis jalur (*path analysis*) digunakan karena menggunakan

¹⁵⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Kbm Indonesia, 2021), h. 13

¹⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, h. 13

¹⁵⁶ *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.*

variabel perantara untuk menganalisis pola hubungan sebab akibat antar variabel guna mengetahui pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel perantara.¹⁵⁷ Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada kemampuannya untuk menguji model penelitian yang kompleks dan bertingkat secara bersamaan, termasuk menganalisis pengaruh langsung (*direct effects*) maupun pengaruh tidak langsung (*indirect effects*).¹⁵⁸

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data potong lintang (*cross-section*).¹⁵⁹ Dalam penelitian ini, data panel digunakan untuk melihat dinamika hubungan antar variabel di 23 Kabupaten/Kota di Aceh selama periode 5 tahun (2020-2024).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah umum yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan ciri dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti serta kemudian disimpulkan.¹⁶⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data statistik mengenai Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPT, dan Kemiskinan di 23

¹⁵⁷ Duryadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), h. 32

¹⁵⁸ Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4* (Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025), h. 17

¹⁵⁹ Agus Tri Basuki, *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Umy, 2021), h. 5

¹⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 80

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶¹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁶² Hal ini dikarenakan jumlah Kabupaten/Kota di Aceh hanya sebanyak 23 Kota/Kabupaten.

Meskipun penelitian ini hanya mencakup 23 Kota/Kabupaten dengan periode pengamatan selama lima tahun, jumlah observasi yang dihasilkan telah memenuhi syarat kecukupan sampel, yaitu sebanyak 115 observasi. Kriteria dalam pengumpulan sampel adalah adanya laporan data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM dan TPT yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh melalui website resmi <https://aceh.bps.go.id/id>.

D. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal atau subjek dari mana informasi dapat dikumpulkan.¹⁶³ Pemilihan jenis sumber data yang tepat sangat penting dalam penelitian karena akan menentukan kualitas dan kekayaan data yang

¹⁶¹ Rahmadani, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 62

¹⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 85

¹⁶³ Slamet Widodo, *dkk., Buku Ajar Metode Penelitian*, (CV Science Techno Direct, 2023), h. 151

diperoleh.¹⁶⁴ Dalam studi ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia.¹⁶⁵ Data ini tidak dikumpulkan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti itu sendiri, melainkan telah dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan sebelumnya oleh badan atau institusi tertentu. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel yang mencakup 23 Kota/Kabupaten. Data Panel merupakan gabungan dimensi waktu (*time-series*) dan dimensi wilayah (*cross-section*).

Data *cross-section* dalam penelitian ini mencakup 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 5 Kota dan 18 kabupaten, sedangkan data *time-series* mencakup periode waktu selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *path analysis* yang diestimasi dengan pendekatan *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* pada perangkat lunak *SmartPLS 4*. Analisis jalur (*path analysis*) digunakan karena menggunakan variabel perantara untuk menganalisis pola hubungan sebab akibat antar variabel guna mengetahui pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari seperangkat

¹⁶⁴ Widodo dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian*.

¹⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 137

variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel perantara.¹⁶⁶ Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada kemampuannya untuk menguji model penelitian yang kompleks dan bertingkat secara bersamaan, termasuk menganalisis pengaruh langsung (*direct effects*) maupun pengaruh tidak langsung (*indirect effects*).¹⁶⁷

Perangkat lunak *SmartPLS 4* digunakan karena menyediakan fitur komprehensif untuk mengestimasi model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), serta pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping*.¹⁶⁸

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁶⁹

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, perhitungan *mean* (rata-rata), *median*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari setiap variabel penelitian.¹⁷⁰ Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai

¹⁶⁶ Duryadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), h. 32

¹⁶⁷ Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4* (Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025), h. 17

¹⁶⁸ Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*.

¹⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 147

¹⁷⁰ Ummiy Fauziyah Laili, *Statistika 1* (CV. Angkasa Pelangi, 2020).

minimum, dan standar deviasi dari variabel Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan TPT periode 2020-2024 di seluruh Kota/Kabupaten di Aceh

2. Evaluasi Model Pengukuran (*outer model*)

Analisis PLS-SEM melibatkan dua sub-model, salah satunya adalah model pengukuran atau *outer model*. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.¹⁷¹ Adapun kelayakan *outer model* ini dapat dinilai dengan uji berikut

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam analisis ini terdiri dari dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dievaluasi menggunakan parameter *loading factor* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Sebuah indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen jika nilai *loading factor* >0,7 dan nilai AVE melebihi 0,5.¹⁷² Sebaliknya, jika nilai AVE kurang dari 0,5, maka validitas konvergen tidak terpenuhi. Sementara itu, validitas diskriminan dapat dinilai dengan memeriksa nilai *cross loading* pada masing-masing variabel.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dievaluasi melalui dua instrumen

¹⁷¹ Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*, (Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025), h. 23

¹⁷² Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*, h. 42

utama, yaitu *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Sebuah konstruk dinilai memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Sebagai penguat, *Cronbach's alpha* digunakan untuk mengonfirmasi hasil tersebut dengan ambang batas minimal sebesar 0,6. *Composite reliability* mencerminkan estimasi nilai reliabilitas yang sebenarnya dari suatu variabel, sedangkan *Cronbach's alpha* menggambarkan batas bawah atau nilai reliabilitas terendah dari variabel tersebut.¹⁷³

Di karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), setiap variabel laten diukur menggunakan satu indikator tunggal. Secara matematis tidak terdapat varians kesalahan pengukuran (*measurement error*). Artinya, nilai indikator diasumsikan sepenuhnya mewakili konstruknya. Konsekuensinya, nilai outer loading secara otomatis bernilai 1,00.

Karena kondisi ini, pengujian validitas dan reliabilitas yang lazim dilakukan pada konstruk dengan indikator multipel seperti *Average Variance Extracted (AVE)*, *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability (CR)* tidak perlu dievaluasi dan dianggap telah memenuhi kriteria secara otomatis. Dengan demikian, seluruh fokus analisis dialihkan kepada evaluasi model struktural (*inner model*).

¹⁷³ Gunistiyo dkk., *Metodologi Penelitian Modern* (Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2024), h. 195

3. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) berfungsi untuk memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten. Model ini menggambarkan keterkaitan antarvariabel tersebut berdasarkan landasan teori substantif yang telah dibangun.¹⁷⁴ Untuk mengevaluasi kelayakan model struktural, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan berikut.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent variable*) dalam memengaruhi variabel terikat (*dependent variable*). Kriteria penilaian untuk nilai R^2 dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, nilai sebesar 0,75 mengindikasikan model yang kuat, nilai 0,50 menunjukkan tingkat pengaruh yang moderat atau sedang, sementara nilai 0,25 menandakan kontribusi pengaruh yang lemah.¹⁷⁵

b. *Predictive Relevance* (Q^2)

Pengujian *predictive relevance* (Q^2) mengintegrasikan pendekatan *cross-validation* dengan fungsi *fitting* guna memprediksi variabel serta mengestimasi parameter konstruk melalui prosedur *blindfolding*. Berdasarkan kekuatannya, nilai Q^2

¹⁷⁴ Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*, (Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025), h. 21

¹⁷⁵ Gunistiyo dkk., *Metodologi Penelitian Modern*, (Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2024), h. 192

dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori kecil sebesar 0,02 kategori sedang sebesar 0,15, dan kategori besar sebesar 0,35. Model dinilai memiliki relevansi prediktif jika nilai Q^2 berada di atas nol ($Q^2 > 0$). Sebaliknya, jika nilai Q^2 kurang dari nol ($Q^2 < 0$), hal tersebut mengindikasikan bahwa model tidak memiliki *predictive relevance*.¹⁷⁶

c. Nilai f^2 (Effect Size)

Pengujian ukuran efek (*effect size* atau f^2) bertujuan untuk mengukur dampak relatif dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model. Interpretasi ukuran efek dibagi menjadi tiga kategori, nilai 0,02 menunjukkan efek kecil, nilai 0,15 menandakan efek sedang, dan nilai 0,35 mengindikasikan efek yang besar. Jika nilai f^2 mendekati angka nol, hal ini mengisyaratkan bahwa penghapusan konstruk tersebut tidak memberikan dampak berarti terhadap kemampuan prediktif model, sehingga urgensi keberadaannya di dalam model layak dipertanyakan.¹⁷⁷

4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengestimasi besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan sebab-akibat antar variabel.¹⁷⁸ Dalam penelitian

¹⁷⁶ Siswoyo Haryono, *Metode SEM* (Jawa Barat: PT. Intermedia Personalia Utama., 2016), h. 388

¹⁷⁷ Gunistiyo dkk., *Metodologi Penelitian Modern*, (Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2024), h. 193

¹⁷⁸ Duryadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), h. 32

ini, analisis jalur difokuskan untuk membedakan dua jenis pengaruh, yaitu:

a. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Digunakan untuk menguji pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi dan IPM terhadap Kemiskinan, serta pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

b. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Digunakan untuk menguji apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan mampu menjadi variabel mediator atau perantara pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Untuk menguji pengaruh-pengaruh tersebut, model analisis jalur dalam penelitian ini dibagi menjadi dua persamaan struktural sebagai berikut:

a. Persamaan 1 (Model Kemiskinan (Y))

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 Z_1 (X_1 \rightarrow Z) + \beta_5 Z_2 (X_2 \rightarrow Z) + e$$

Keterangan:

Y : Kemiskinan

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Indeks Pembangunan Manusia

Z : Tingkat Pengangguran Terbuka

β_1 : Koefisien pengaruh langsung X1 terhadap Y

β_2 : Koefisien pengaruh langsung X2 terhadap Y

β_3 : Koefisien pengaruh langsung Z terhadap Y

$\beta_{4Z1}(X_1 \rightarrow Z)$: Koefisien jalur pengaruh X_1 terhadap Y melalui Z

$\beta_{5Z2}(X_2 \rightarrow Z)$: Koefisien jalur pengaruh X_2 terhadap Y melalui Z

e : Error term (variabel pengganggu)

b. Persamaan 2 (Model Tingkat Pengangguran Terbuka (Z))

$$Z = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Z : Tingkat Pengangguran Terbuka

X_1 : Pertumbuhan Ekonomi

X_2 : Indeks Pembangunan Manusia

β_1 : Koefisien pengaruh langsung X_1 terhadap Y

β_2 : Koefisien pengaruh langsung X_2 terhadap Y

e : Error term (variabel pengganggu)

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan analisis *Outer Model* dan *Inner Model*. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai t-statistik dan tingkat probabilitas (*p-value*). Pada signifikansi $\alpha = 5\%$, batas kritis t-statistik yang ditetapkan adalah 1,96. Oleh karena itu, hipotesis diterima apabila nilai t-statistik $> 1,96$. Sementara itu, jika pengujian menggunakan nilai probabilitas, hipotesis

dinyatakan diterima apabila nilai $p < 0,05$.¹⁷⁹ Pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan *Bootstrapping* pada perangkat lunak *SmartPLS* 4 untuk pengaruh langsung dan tidak langsung.

6. Uji Efek Mediasi

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh tidak langsung pada penelitian ini. Prosedur pengujian mediasi dalam penelitian ini menggunakan 3 ketentuan pada setiap jalurnya. Berikut adalah ketentuan pengujian mediasi pada penelitian ini

- a. Jalur pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z) terhadap Kemiskinan (Y)
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
 - 2) Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
 - 3) Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)
- b. Jalur pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X2) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z) terhadap Kemiskinan (Y)
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)

¹⁷⁹ Achi Rinalsi dkk., *Statistik Inferensial* (Bogor: IPB Press, 2020), h. 47

- b. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
- c. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Selanjutnya, penghitungan efek mediasi menggunakan VAF (*Variance Accounted For*) dengan rumus sebagai berikut

$$VAF = \frac{\text{Pengaruh Tidak Langsung}}{\text{Pengaruh Tidak Langsung} + \text{Pengaruh Langsung}}$$

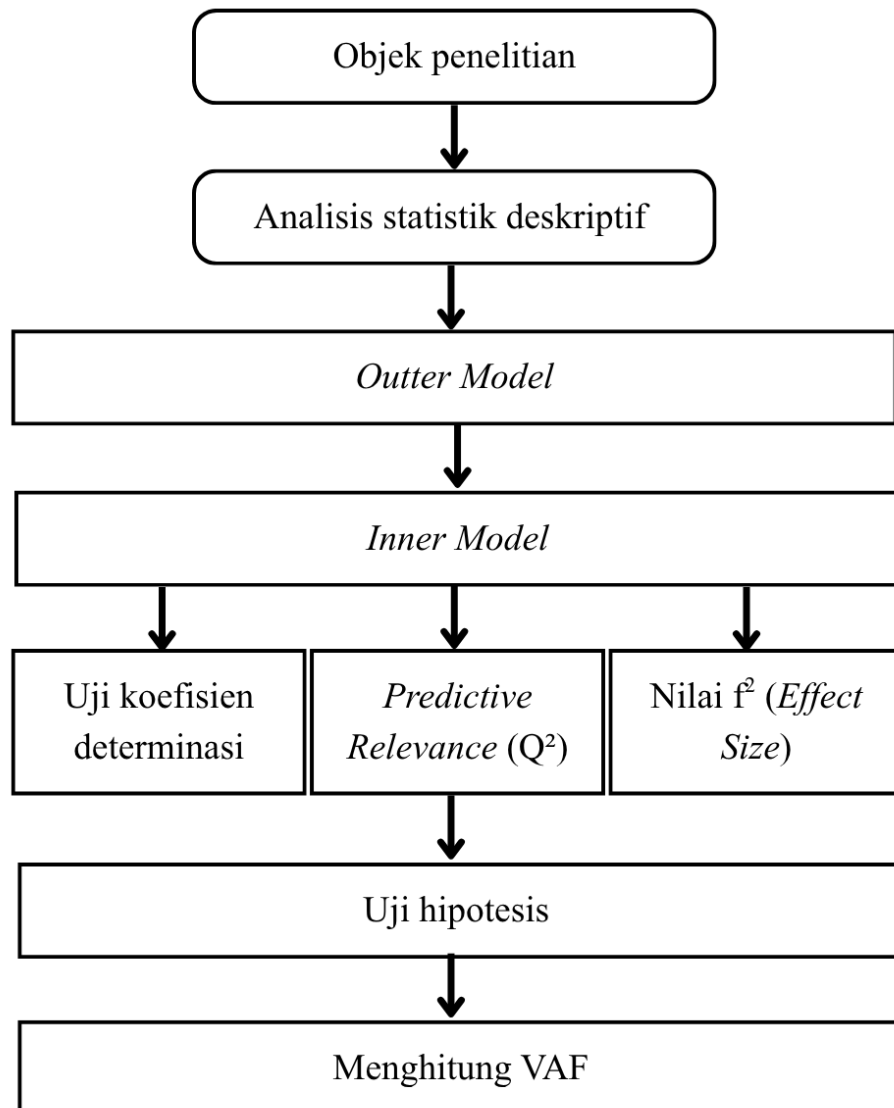
Dengan ketentuan, Jika nilai VAF di atas 80%, maka menunjukkan peran variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai mediasi penuh dan jika nilai VAF berkisar antara 20% sampai dengan 80% maka dikategorikan sebagai mediasi parsial, namun jika nilai VAF kurang dari 20% dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada efek mediasi.¹⁸⁰

F. Alur Penggunaan Aplikasi

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak olah data berupa *Smart PLS 4*. Berikut adalah kerangka alur penggunaan aplikasi *Smart PLS 4*.

¹⁸⁰ Achi Rinalsi dkk., *Statistik Inferensial*, h. 77

Gambar III.1 Kerangka Alur Penggunaan Aplikasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera dan menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Secara geografis, Provinsi Aceh terletak antara 2°–6° Lintang Utara dan 95°–98° Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan sekitar 57.956,00 km² atau sekitar 3,02% dari luas daratan Indonesia. Posisi strategis ini menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah melalui jalur pelayaran Selat Malaka.¹⁸¹

Provinsi Aceh berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan dan tenggara, Selat Malaka di sebelah utara dan timur, serta Samudera Hindia di sebelah barat dan selatan. Secara administratif, Provinsi Aceh terbagi menjadi 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.¹⁸²

Provinsi Aceh memiliki topografi yang beragam, mulai dari daerah pantai yang landai di pesisir timur dan barat hingga daerah pegunungan yang

¹⁸¹ Komisi Informasi Pusat RI, *Laporan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik* (Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI, 2021), h. 2

¹⁸² Komisi Informasi Pusat RI, *Laporan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik*, h. 3

dilalui oleh Pegunungan Bukit Barisan di bagian tengah. Kondisi geografis ini memberikan keragaman iklim di berbagai wilayah, di mana sebagian besar wilayah Aceh beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Keanekaragaman kondisi geografis ini turut memengaruhi struktur perekonomian dan tingkat kemiskinan yang bervariasi antarwilayah di Aceh.¹⁸³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Aceh mencapai sekitar 5,5 juta jiwa.¹⁸⁴ Perekonomian Aceh ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan. Meskipun berbagai sektor ekonomi terus berkembang, Provinsi Aceh masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang cukup serius, di mana per Maret 2024 tingkat kemiskinannya mencapai 14,23%, menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.¹⁸⁵

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dalam hal pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.¹⁸⁶ Dalam penelitian ini, kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk

¹⁸³ Bappeda, *Strategi PENCEPATAN Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh* (Bappeda, 2015), h. 28

¹⁸⁴ BPS, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2025* (BPS Provinsi Aceh, 2025), h. 43

¹⁸⁵ BPS, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2025*, h. 51

¹⁸⁶ BPS, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023*, vol. 15, h. 58

miskin di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024. Perkembangan tingkat kemiskinan di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh selama periode penelitian tersaji pada tabel berikut.

Tabel IV.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	18,49%	18,98%	18,37%	17,92%	17,69%
2	Aceh Singkil	20,20%	20,36%	19,18%	19,15%	19,06%
3	Aceh Selatan	12,87%	13,18%	12,43%	12,10%	12,02%
4	Aceh Tenggara	13,21%	13,41%	12,83%	12,45%	11,99%
5	Aceh Timur	14,08%	14,45%	13,91%	13,39%	13,26%
6	Aceh Tengah	15,08%	15,26%	14,50%	14,38%	14,27%
7	Aceh Barat	18,34%	18,81%	17,93%	17,86%	17,60%
8	Aceh Besar	13,84%	14,05%	13,38%	13,38%	13,21%
9	Pidie	19,23%	19,59%	18,79%	18,78%	18,59%
10	Bireuen	13,06%	13,25%	12,51%	12,12%	12,10%
11	Aceh Utara	17,02%	17,43%	16,86%	16,64%	16,11%
12	Aceh Barat Daya	15,93%	16,34%	15,44%	15,43%	15,32%
13	Gayo Lues	19,32%	19,64%	18,87%	18,82%	18,30%
14	Aceh Tamiang	13,08%	13,34%	12,61%	12,51%	12,17%
15	Nagan Raya	17,70%	18,23%	17,38%	17,25%	16,94%
16	Aceh Jaya	12,87%	13,23%	12,51%	12,42%	12,25%
17	Bener Meriah	18,89%	19,16%	18,39%	18,31%	18,18%
18	Pidie Jaya	19,19%	19,55%	18,45%	18,40%	18,28%
19	Banda Aceh	6,90%	7,61%	7,13%	7,04%	6,95%
20	Sabang	14,94%	15,32%	14,66%	14,59%	14,58%
21	Langsa	10,44%	10,96%	10,62%	10,53%	10,33%
22	Lhokseumawe	10,80%	11,16%	10,84%	10,73%	10,44%
23	Subulussalam	17,60%	17,65%	16,94%	16,41%	16,38%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel IV.1, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, namun laju penurunannya relatif lambat. Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues mencatat angka kemiskinan

tertinggi, masing-masing sebesar 19,06% dan 18,30% pada tahun 2024. Sebaliknya, Kota Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 6,95% pada tahun 2024. Meskipun seluruh wilayah mengalami penurunan, rata-rata penurunan per tahun hanya berkisar 0,5% hingga 1%, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, Kota Banda Aceh mencatatkan angka persentase penduduk miskin sebesar 6,95% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapat 6,95% dari total populasi penduduk di Kota Banda Aceh yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain 6,95% penduduk di kota Banda Aceh berada dibawah Garis Kemiskinan atau termaksud ke dalam kategori miskin dan mayoritas masyarakat di ibu kota provinsi atau sebesar 93,05% telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, baik dari aspek kecukupan makanan maupun kebutuhan non-makanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional atau output agregat dalam jangka panjang.¹⁸⁷ Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur menggunakan

¹⁸⁷ Sarahfina dkk., "Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi." h. 489

persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data pertumbuhan ekonomi di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	0,12%	3,41%	4,20%	4,63%	4,43%
2	Aceh Singkil	-1,01%	3,90%	3,61%	3,52%	3,46%
3	Aceh Selatan	-0,05%	2,46%	3,11%	3,53%	3,21%
4	Aceh Tenggara	-0,17%	1,57%	2,69%	3,04%	3,59%
5	Aceh Timur	1,54%	1,94%	3,73%	2,09%	4,63%
6	Aceh Tengah	-1,18%	3,30%	4,93%	5,60%	4,98%
7	Aceh Barat	1,88%	5,84%	3,28%	4,08%	7,50%
8	Aceh Besar	0,39%	2,44%	3,87%	4,37%	4,95%
9	Pidie	-0,12%	2,63%	3,98%	3,95%	4,15%
10	Bireuen	-1,02%	4,09%	4,35%	4,38%	4,52%
11	Aceh Utara	0,98%	-0,54%	4,69%	0,51%	3,56%
12	Aceh Barat Daya	-0,65%	2,88%	3,87%	3,92%	4,24%
13	Gayo Lues	0,88%	2,32%	3,51%	3,98%	3,26%
14	Aceh Tamiang	0,42%	0,88%	3,27%	2,25%	4,25%
15	Nagan Raya	3,36%	4,26%	3,17%	6,83%	4,38%
16	Aceh Jaya	-0,62%	2,59%	3,68%	4,15%	3,83%
17	Bener Meriah	0,09%	3,42%	3,42%	5,22%	3,27%
18	Pidie Jaya	-0,79%	2,03%	3,57%	4,24%	4,55%
19	Banda Aceh	-3,39%	5,51%	5,23%	5,06%	6,08%
20	Sabang	-1,29%	2,67%	2,57%	2,96%	4,16%
21	Langsa	-1,12%	3,92%	4,78%	4,22%	4,43%
22	Lhokseumawe	-1,80%	3,84%	4,01%	4,21%	4,46%
23	Subulussalam	1,97%	3,87%	4,12%	4,06%	4,12%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel IV.2, hampir seluruh wilayah di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun sejak tahun 2021, perekonomian sebagian besar kabupaten/kota mulai pulih dan tumbuh positif. Pada

tahun 2024, Kabupaten Aceh Barat mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,50%, diikuti oleh Kota Banda Aceh sebesar 6,08%. Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu 3,21% pada tahun 2024. Namun, jika fenomena pertumbuhan ekonomi yang membaik ini belum mampu secara signifikan menurunkan kemiskinan mengindikasikan terjadinya *jobless growth* di Provinsi Aceh.

Sebagai salah satu contoh pergerakan fluktuasi tersebut, Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,05% pada tahun 2020. Angka -0,05% ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Kabupaten Aceh Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun nilai penurunannya relatif kecil atau mendekati nol, angka ini tetap mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, aktivitas produksi barang dan jasa di wilayah tersebut sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, Kabupaten Aceh Selatan berhasil keluar dari penurunan tersebut dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 2,46%. Angka ini mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi (*economic recovery*), di mana roda perekonomian dan *output* produksi daerah tersebut sudah mulai bergerak naik kembali dari kondisi terpuruk di tahun 2020. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 3,21%. Peningkatan yang konsisten

ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Aceh Selatan, baik dari sektor basis maupun sektor pendukung lainnya, telah kembali stabil dan mengalami ekspansi secara bertahap.

3. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.¹⁸⁸ Dalam penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel independen kedua. Data IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.3 Data Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	67,90%	68,29%	69,17%	69,98%	70,95%
2	Aceh Singkil	69,92%	70,21%	70,61%	71,14%	71,76%
3	Aceh Selatan	69,79%	70,12%	70,56%	71,14%	71,82%
4	Aceh Tenggara	71,21%	71,28%	72,18%	72,93%	73,59%
5	Aceh Timur	69,02%	69,22%	70,13%	70,73%	71,29%
6	Aceh Tengah	75,07%	75,20%	75,79%	76,45%	77,27%
7	Aceh Barat	73,11%	73,41%	74,09%	74,62%	75,45%
8	Aceh Besar	75,00%	75,03%	75,44%	75,98%	76,57%
9	Pidie	71,92%	71,99%	72,49%	72,95%	73,60%
10	Bireuen	73,22%	73,27%	74,10%	74,56%	75,39%
11	Aceh Utara	70,95%	71,08%	71,85%	72,50%	73,35%
12	Aceh Barat Daya	69,12%	69,37%	69,79%	70,47%	71,16%
13	Gayo Lues	69,06%	69,42%	70,12%	70,82%	71,75%
14	Aceh Tamiang	70,87%	71,12%	72,08%	73,02%	74,00%
15	Nagan Raya	70,54%	70,67%	71,46%	72,15%	73,10%

¹⁸⁸ Prasetya, “Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur.” h. 23

16	Aceh Jaya	71,30%	71,39%	71,92%	72,44%	73,40%
17	Bener Meriah	74,54%	74,84%	75,46%	76,06%	76,58%
18	Pidie Jaya	74,44%	74,84%	75,59%	76,04%	76,39%
19	Banda Aceh	87,06%	87,36%	87,92%	88,32%	88,85%
20	Sabang	76,96%	77,29%	78,03%	78,70%	79,50%
21	Langsa	79,30%	79,58%	79,96%	80,50%	80,96%
22	Lhokseumawe	78,65%	78,92%	79,38%	80,26%	80,89%
23	Subulussalam	67,39%	67,75%	68,72%	69,66%	70,64%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel IV.3, IPM di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Kota Banda Aceh mencatat IPM tertinggi sebesar 88,85% pada tahun 2024 dengan kategori sangat tinggi, diikuti oleh Kota Langsa sebesar 80,96% dan Kota Lhokseumawe sebesar 80,89%. Sementara itu, Kabupaten Subulussalam memiliki IPM terendah yaitu 70,64% pada tahun 2024 dengan kategori tinggi. Peningkatan IPM yang konsisten ini mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Aceh.

Ditinjau lebih mendalam pada tahun 2024, IPM Kota Subulussalam tercatat sebesar 70,21% yang menurut kategori dari BPS, angka tersebut berada pada kategori sedang. Angka merupakan nilai rata-rata ukur dari tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia. Yang artinya ketiga dimensi tersebut meliputi dimensi kesehatan (harapan hidup yang panjang dan sehat), dimensi pengetahuan (tingkat pendidikan dan lama sekolah), serta dimensi ekonomi (standar hidup layak yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat) sudah terpenuhi.

Angka ini menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kota Subulussalam semakin maju. Hal ini terjadi karena berbagai program yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti perluasan akses fasilitas kesehatan, penyediaan sarana pendidikan, serta stimulus penguatan ekonomi telah berhasil terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu meningkatkan standar kualitas hidup di wilayah tersebut.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.¹⁸⁹ Pengangguran terbuka mencakup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.¹⁹⁰

Dalam penelitian ini, TPT berperan sebagai variabel mediator yang menghubungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Data TPT di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

¹⁸⁹ Julita dkk., “Penerapan Radial Basis Function Neural Network Dalam Mengklasifikasikan Kab/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat.” h. 46

¹⁹⁰ Novianti, “Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia.” h. 20

Tabel IV.4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh Per Kota/Kabupaten Periode 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	5,47%	5,71%	6,00%	5,85%	5,50%
2	Aceh Singkil	8,24%	8,36%	6,88%	6,84%	6,44%
3	Aceh Selatan	6,54%	6,46%	4,82%	4,73%	4,56%
4	Aceh Tenggara	5,72%	6,43%	5,09%	5,00%	4,79%
5	Aceh Timur	7,26%	7,13%	8,07%	8,03%	7,75%
6	Aceh Tengah	3,05%	2,61%	4,44%	4,42%	4,21%
7	Aceh Barat	7,30%	7,09%	6,09%	6,07%	5,58%
8	Aceh Besar	7,62%	7,70%	8,28%	8,17%	7,93%
9	Pidie	6,45%	7,28%	5,94%	5,92%	5,74%
10	Bireuen	4,12%	4,32%	4,20%	4,14%	3,93%
11	Aceh Utara	8,56%	8,31%	7,08%	7,07%	6,88%
12	Aceh Barat Daya	3,93%	4,04%	4,12%	4,08%	3,83%
13	Gayo Lues	2,01%	1,84%	2,70%	2,65%	2,40%
14	Aceh Tamiang	7,97%	5,87%	7,38%	7,21%	6,95%
15	Nagan Raya	5,11%	4,99%	5,84%	5,74%	5,22%
16	Aceh Jaya	4,08%	3,47%	3,12%	2,88%	2,75%
17	Bener Meriah	1,35%	1,24%	2,61%	2,45%	2,20%
18	Pidie Jaya	6,58%	3,57%	4,40%	4,34%	3,82%
19	Banda Aceh	9,54%	8,94%	8,62%	8,03%	7,55%
20	Sabang	4,81%	3,56%	4,01%	3,92%	2,95%
21	Langsa	9,75%	7,21%	7,85%	7,73%	7,34%
22	Lhokseumawe	11,99%	11,16%	9,15%	8,78%	8,47%
23	Subulussalam	6,93%	6,26%	5,75%	5,69%	5,12%

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel IV.4, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam TPT antarwilayah di Provinsi Aceh. Pada tahun 2024, Kota Lhokseumawe memiliki TPT tertinggi sebesar 8,47%, diikuti oleh Kabupaten Aceh Besar sebesar 7,93% dan Kota Banda Aceh sebesar 7,55%. Sebaliknya, Kabupaten Bener Meriah mencatat TPT terendah sebesar 2,20%, diikuti oleh Gayo Lues sebesar 2,40%. Secara umum, wilayah perkotaan dan kawasan industri cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan

basis perekonomian pertanian. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam daya serap tenaga kerja, di mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM belum sepenuhnya mampu mengurangi pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan.

Ditinjau lebih mendalam pada wilayah pusat perkotaan, Kota Banda Aceh mencatatkan angka TPT sebesar 7,55% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan persentase jumlah penganggur terbuka terhadap total jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh. Artinya, dari seluruh kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang aktif mencari kerja, terdapat sebesar 7,55% penduduk yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tingginya angka TPT sebesar 7,55% di ibu kota provinsi ini disebabkan oleh karakteristik wilayah perkotaan yang menjadi pusat daya tarik bagi para pencari kerja dari berbagai kabupaten/kota sekitarnya, sehingga penawaran tenaga kerja melimpah. Di sisi lain, lapangan pekerjaan di sektor formal, jasa, dan perdagangan perkotaan menuntut kualifikasi serta spesifikasi keahlian yang tinggi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja riil, yang pada akhirnya menyebabkan angka pengangguran di Kota Banda Aceh tetap berada pada persentase yang relatif tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum

mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁹¹

Adapun variabel yang dianalisis meliputi Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 23 kabupaten/kota selama periode 2020-2024. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Min	Max	Std. Dev.	Skewness
Kemiskinan	15,08	15,08	6,90	20,36	3,28	-0,43
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	3,01	3,56	-3,39	7,50	1,97	-0,90
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,86	72,95	67,390	88,85	4,39	1,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,75	1,240	11,99	2,13	0,12

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.5,

a. Variabel Kemiskinan

Variabel Kemiskinan memiliki nilai rata-rata dan nilai tengah atau median yang sama persis di angka 15,08%. Angka ini menjelaskan bahwa jika seluruh wilayah diurutkan, daerah yang berada tepat di posisi tengah memiliki tingkat kemiskinan sebesar 15,08%, yang berarti tepat separuh wilayah berada di bawah angka tersebut dan separuh lainnya berada di atasnya. Hal ini

¹⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), h, 147

menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Aceh bukan lagi kasus musiman di satu dua kabupaten/kota saja, melainkan sudah menjadi masalah menahun yang merata di lapangan.

Adanya jarak yang lebar antara nilai terendah yaitu sebesar 6,90% dan nilai tertinggi sebesar 20,36%, berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial yang tajam antar kabupaten/kota. Ditambah lagi, nilai kemiringan (*skewness*) yang negatif -0,43, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah sebenarnya memiliki tingkat kemiskinan yang menumpuk di angka-angka tinggi atau berada di atas rata-rata. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa daerah yang miskin jauh lebih banyak daripada daerah yang sejahtera.

b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pertumbuhan Ekonomi, nilai rata-ratanya sebesar 3,01%, sedangkan nilai tengahnya atau median berada di angka 3,56%. Angka ini menunjukkan jika semua daerah diurutkan dari yang pertumbuhan ekonominya paling rendah hingga paling tinggi, daerah yang berada tepat di tengah-tengah memiliki pertumbuhan sebesar 3,56%. Dampak dari nilai median yang lebih besar daripada nilai rata-rata mengindikasikan bahwa mayoritas daerah atau lebih dari setengah sampel kondisi ekonominya tumbuh cukup baik di atas 3,56%.

Angka rata-rata wilayah secara keseluruhan terlihat kecil hanya karena terseret turun oleh satu atau dua daerah yang ekonominya anjlok parah. Dampak ini terlihat nyata dari nilai terendah yang menyentuh angka minus yaitu -3,39%, yang berarti ada daerah yang mengalami kemerosotan atau penurunan lokal dimana bisnis menurun dan toko-toko tutup. Meskipun ada daerah yang tumbuh hingga 7,50%, nilai kemiringan yang negatif sebesar -0,90 mempertegas dampak bahwa ekonomi yang mengalami penurunan tajam di beberapa daerah tersebut membuat jurang ketimpangan antar wilayah semakin lebar.

c. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai rata-rata sebesar 73,86 secara umum berdampak positif karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat sudah masuk kategori tinggi. Namun, nilai tengahnya (median) yang tercatat sebesar 72,95 memberikan gambaran riil bahwa tepat separuh dari total kabupaten/kota di lapangan sebenarnya memiliki kualitas manusia dengan IPM di bawah 72,95.

Dampak dari nilai median yang lebih kecil dari nilai rata-rata ini menunjukkan adanya polesan data, di mana kualitas hidup yang tinggi itu belum merata di masyarakat. Angka rata-rata wilayah bisa terlihat sangat bagus hanya karena terdongkrak oleh satu atau dua kota besar yang fasilitas sekolah dan rumah sakitnya sangat

mewah, padahal kenyataannya mayoritas daerah kondisi IPM-nya masih pas-pasan dan berada di batas bawah. Ketimpangan fasilitas dasar ini diperkuat oleh jarak yang sangat jauh antara nilai terendah sebesar 67,39 di daerah pelosok yang menunjukkan kurangnya tenaga medis atau guru dan nilai tertinggi sebesar 88,85 di perkotaan maju, yang didukung oleh nilai kemiringan positif yang tinggi sebesar 1,44.

d. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nilai rata-rata dan nilai tengahnya (median) berada di angka yang sama persis yaitu 5,75%. Artinya, separuh wilayah memiliki tingkat pengangguran di bawah 5,75%, dan separuh wilayah lainnya berada di atas itu. Karena nilai median ini sama dengan rata-ratanya, dampaknya ke variabel ketenagakerjaan menunjukkan kondisi jenuh yang merata di lapangan. Masalah pengangguran ini bukan masalah yang ada di satu daerah saja, melainkan setengah dari seluruh wilayah memang mengalami kesulitan yang sama dalam membuka lapangan kerja.

Dampak sosial yang berbahaya terlihat pada nilai tertinggi yang membubung hingga 11,99%, di mana daerah dengan pengangguran hampir 12% ini rawan menghadapi rentetan dampak negatif seperti lonjakan angka kriminalitas dan kemiskinan baru

karena banyaknya usia produktif yang stres tidak memiliki penghasilan.

Nilai kemiringan yang sangat mendekati normal sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran ini adalah nasib bersama yang polanya mirip di seluruh wilayah, sehingga butuh kebijakan makro yang serentak seperti pembukaan lowongan kerja atau kemudahan investasi daerah.

2. Evaluasi Model Pengukuran (*outer model*)

Evaluasi *outer model* atau model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar valid dan reliabel dalam mengukur variabel penelitiannya.¹⁹² Dalam penelitian ini, analisis *outer model* difokuskan pada nilai *loading factor* untuk menguji validitas konstruk dari masing-masing variabel yang diamati. Hasil evaluasi model pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.6 Hasil Outer Model

Variabel	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Kemiskinan	1,000	Valid
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	1,000	Valid
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1,000	Valid
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas, diketahui bahwa nilai *loading factor* untuk masing-masing variabel, yaitu IPM, Kemiskinan, PE, dan

¹⁹² Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*, (Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025), h. 23

TPT, adalah sebesar 1,000 dan dinyatakan valid. Mengingat seluruh variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal (*single-indicator construct*), maka evaluasi *outer model* dilakukan secara langsung tanpa prosedur uji reliabilitas komposit maupun validitas konvergen yang umum diterapkan pada variabel laten dengan indikator ganda. Hal ini dikarenakan setiap indikator telah mewakili variabelnya secara penuh, sehingga nilai *loading factor* secara otomatis bernilai sempurna

3. Evaluasi Model Struktural (*inner model*)

Evaluasi *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel serta melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen.¹⁹³ Pengujian model struktural dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yaitu

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model.¹⁹⁴ Hasil analisis R^2 disajikan pada tabel berikut

Tabel IV.7 Hasil Analisis R^2

Variabel	R-square	R-square adjusted	Keterangan
Kemiskinan	0,443	0,428	Moderat

¹⁹³ Hatta Setiabudhi dkk., *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*, h. 21

¹⁹⁴ Gunistiyo dkk., *Metodologi Penelitian Modern*, (Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2024), h. 192

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,106	0,090	Lemah
---	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.7 diatas, nilai R^2 variabel Kemiskinan sebesar 0,443 menunjukkan bahwa sekitar 44,3% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, PE, dan TPT dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini termasuk kategori moderat. Sementara itu, R^2 variabel TPT sebesar 0,106 dikategorikan lemah, mengindikasikan bahwa variabel IPM dan PE hanya mampu menjelaskan sekitar 10,6% variasi pengangguran, dan terdapat faktor penentu TPT lainnya yang tidak tercakup dalam model ini

b. Relevansi Prediktif (Q^2)

Pengujian *predictive relevance* (Q^2) mengintegrasikan pendekatan *cross-validation* dengan fungsi *fitting* guna memprediksi variabel serta mengestimasi parameter konstruk melalui prosedur *blindfolding*. Nilai $Q^2 > 0$ mengindikasikan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai.¹⁹⁵ Hasil relevansi prediktif dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.8 Hasil Relevansi Prediktif

Variabel	Q^2 predict	Keterangan
Kemiskinan	0,385	Relevansi Besar

¹⁹⁵ Siswoyo Haryono, *Metode SEM* (Jawa Barat: PT. Intermedia Personalia Utama., 2016), h. 388

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,069	Relevansi Kecil
---	-------	-----------------

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Nilai Q^2 Kemiskinan sebesar 0,385 mengindikasikan relevansi prediktif yang besar, artinya model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi kemiskinan. Nilai Q^2 TPT sebesar 0,069 menunjukkan relevansi prediktif yang kecil, sejalan dengan nilai R^2 yang rendah. Meski demikian, kedua nilai $Q^2 > 0$ sehingga model tetap memiliki relevansi prediktif minimal.

c. Nilai f^2 (*Effect Size*)

Pengujian ukuran efek (*effect size* atau f^2) bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi substantif dari setiap variabel eksogen terhadap nilai koefisien determinasi (R^2) pada variabel endogen terkait.¹⁹⁶ Hasil pengujian nilai f^2 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.9 Hasil Analisis *Effect Size*

Jalur	Nilai f^2	Kategori Efek
PE terhadap Kemiskinan (X1)	0,005	Tidak Ada Efek
IPM terhadap Kemiskinan	0,515	Besar
TPT terhadap Kemiskinan	0,078	Kecil
PE terhadap TPT	0,027	Kecil
IPM terhadap TPT	0,107	Kecil

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.9 diatas, Nilai f^2 pada jalur Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Kemiskinan sebesar 0,005

¹⁹⁶ Gunistiyo dkk., *Metodologi Penelitian Modern*, (Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2024), h. 193

berada di bawah ambang batas 0,02, menandakan tidak adanya efek langsung yang berarti dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Pada jalur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan memiliki nilai f^2 sebesar 0,515 yang jauh melampaui ambang batas 0,35 sehingga dikategorikan memiliki ukuran efek besar. Ini menegaskan bahwa IPM adalah penentu dominan kemiskinan dalam model.

Pada jalur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan, PE terhadap TPT, dan IPM terhadap TPT memiliki nilai f^2 sebesar 0,078, 0,027 dan 0,107 secara berurutan. Nilai f^2 ini menunjukkan bahwa ukuran efek masuk pada kategori kecil.

4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengestimasi besarnya koefisien jalur (*path coefficient*) yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan sebab-akibat antar variabel secara langsung (*direct effect*) maupun secara tidak langsung (*indirect effect*).¹⁹⁷

Tabel IV.10 Hasil *Path Coefficient*

Jalur	<i>Path coefficient</i>
PE (X1) terhadap Kemiskinan (Y)	0,052
IPM (X2) terhadap Kemiskinan (Y)	-0,573
TPT (Z) terhadap Kemiskinan (Y)	0,220
PE (X1) terhadap TPT (Z)	0,158
IPM (X2) terhadap TPT (Z)	-0,313
PE (X1) terhadap Kemiskinan (Y) melalui TPT (Z)	0,035
IPM (X2) terhadap Kemiskinan (Y) melalui TPT (Z)	-0,069

¹⁹⁷ Duryadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), h. 32

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.10 diatas maka persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persamaan 1 (Model Kemiskinan (Y))

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 Z_1 (X_1 \rightarrow Z) + \beta_5 Z_2 (X_2 \rightarrow Z) + e$$

$$Y = 0,052X_1 - 0,573X_2 + 0,220Z + 0,035Z_1 - 0,069Z_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,052, Hal ini menunjukkan adanya pengaruh langsung yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan, di mana setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti oleh peningkatan Kemiskinan sebesar 0,052 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (X2) memiliki nilai koefisien langsung bernilai negatif sebesar -0,573.

Nilai ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan kualitas IPM sebesar satu, maka tingkat Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,573. Pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT (Z) sebagai variabel mediator memiliki koefisien pengaruh langsung sebesar 0,220 pada Kemiskinan (Y). Arah pengaruh ini menunjukkan seberapa besar perubahan tingkat kemiskinan yang dipicu secara langsung oleh naik turunnya angka pengangguran terbuka di daerah tersebut.

Koefisien pengaruh tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi melalui TPT terhadap Kemiskinan adalah sebesar +0,035. Nilai positif ini menandakan bahwa keberadaan TPT sebagai variabel mediator justru memperkuat dampak positif Pertumbuhan Ekonomi dalam meningkatkan tingkat Kemiskinan sebesar 0,035.

Koefisien pengaruh tidak langsung IPM melalui TPT terhadap Kemiskinan menunjukkan nilai negatif sebesar -0,069. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui perantara TPT, peningkatan kualitas IPM memberikan kontribusi atau andil tambahan yang efektif dalam menekan dan menurunkan tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 0,069. Simbol nilai *error* (*e*) menegaskan bahwa variasi naik turunnya tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh variabel di dalam model.

b. Persamaan 2 (Model Tingkat Pengangguran Terbuka (Z))

$$Z = 0,158X_1 - 0,313X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, Pertumbuhan Ekonomi (X_1) memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,158. Hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti setiap terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, maka akan diikuti oleh kenaikan TPT di Provinsi Aceh sebesar 0,158 dengan asumsi variabel lain konstan.

Hubungan positif ini mengarah pada fenomena *jobless growth*, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup luas atau padat karya. Hal ini lebih didorong oleh sektor padat modal, sehingga angka pengangguran justru cenderung ikut meningkat seiring dengan naiknya *output* perekonomian.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (X2) menunjukkan nilai koefisien jalur bernilai negatif sebesar -0,313. Nilai ini menegaskan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara IPM dengan pengangguran, di mana setiap kenaikan kualitas IPM akan berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,313.

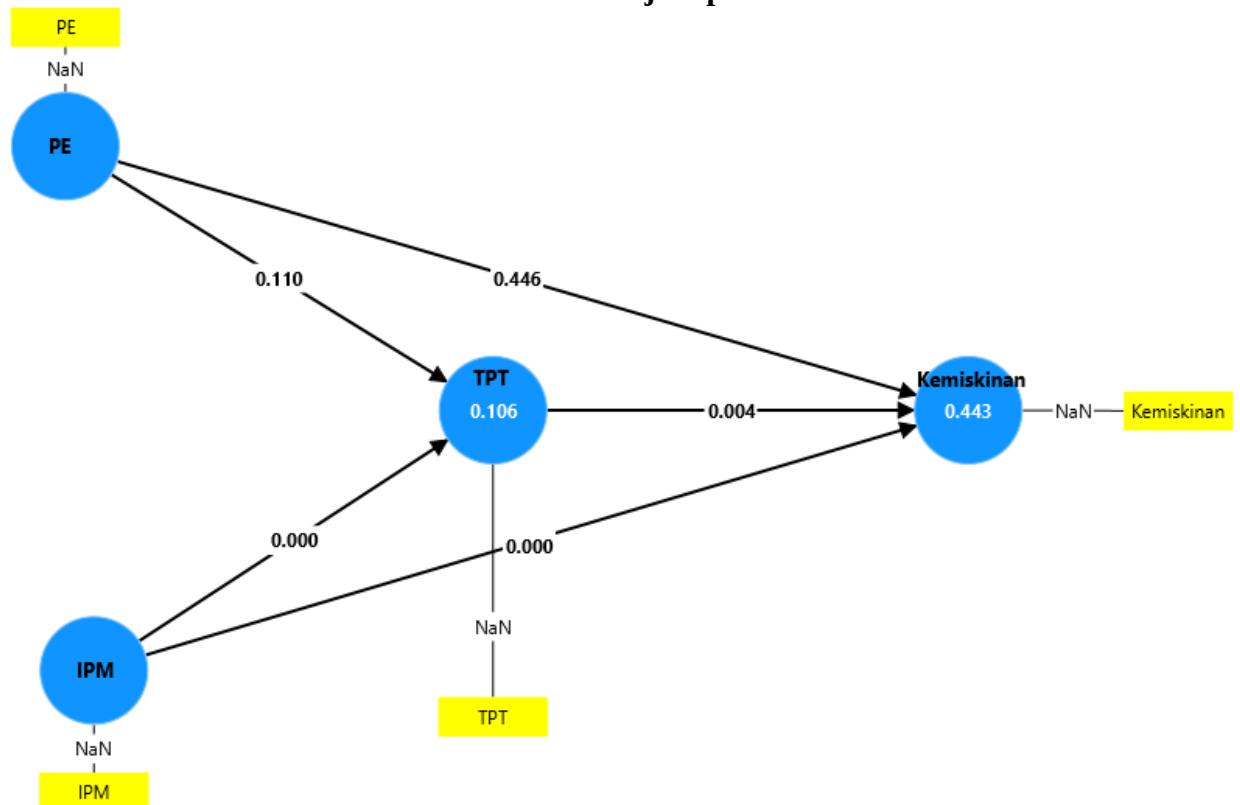
Hasil ini secara empiris membuktikan bahwa peningkatan kualitas modal manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan di Provinsi Aceh mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja sehingga mereka lebih mudah terserap di pasar kerja. *Error* (e) di ujung persamaan menunjukkan adanya kontribusi atau variasi nilai TPT yang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang tidak ikut diukur dalam model struktural pertama ini.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai t-

statistik dan tingkat probabilitas (*p-value*).¹⁹⁸ Visualisasi dari hubungan antar variabel beserta nilai koefisien jalur (*p-value*) dapat dilihat pada Gambar IV.1 di bawah:

Gambar IV.1 Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS

Untuk melihat detail nilai *t-statistik* dan signifikansi dari masing-masing hubungan langsung tersebut secara lebih rinci, hasil pengujian hipotesis dirangkum dalam pembahasan berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan atau dampak yang terjadi secara langsung dari variabel eksogen ke

¹⁹⁸ Achi Rinalsi dkk., *Statistik Inferensial* (Bogor: IPB Press, 2020), h. 47

variabel endogen, tanpa melalui variabel perantara apa pun. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.11 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Jalur	<i>Path coefficient</i>	T-statistik	<i>P-value</i>
PE (X1) terhadap Kemiskinan (Y)	0,052	0,762	0,446
IPM (X2) terhadap Kemiskinan (Y)	-0,573	8,176	0,000
TPT (Z) terhadap Kemiskinan (Y)	0,220	2,873	0,004
PE (X1) terhadap TPT (Z)	0,158	1,598	0,110
IPM (X2) terhadap TPT (Z)	-0,313	3,498	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.11 diatas, maka pengaruh langsung dari setiap jalur adalah sebagai berikut:

- 1) Pada jalur PE terhadap Kemiskinan, tidak terdapat pengaruh dikarenakan nilai *p-value* sebesar 0,446 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik juga yaitu 0,762 lebih kecil dari 1,96. Begitu juga pada jalur PE terhadap TPT dimana nilai *p-value* sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 1,598 lebih kecil dari 1,96.
- 2) Pada jalur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan, nilai *p-value* didapatkan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan t-statistik sebesar 8,176 lebih besar dari 1,96. Jalur ini memiliki nilai *path coefficient* negatif sebesar -0,573, yang berarti IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan IPM secara langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan.

- 3) Pada jalur TPT terhadap Kemiskinan, nilai *p-value* tercatat sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan t-statistik sebesar 2,873. lebih besar dari 1,96. Hubungan ini juga memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif berdasarkan nilai *path coefficient* sebesar 0,220. Artinya setiap kenaikan TPT secara langsung maka tingkat kemiskinan akan naik.
- 4) Pada jalur PE terhadap TPT, nilai *p-value* sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05 dan t-statistik sebesar 1,598 lebih kecil dari 1,96. Nilai *path coefficient* yang diperoleh pada jalur ini adalah sebesar 0,158. Ini mengindikasikan bahwa PE memiliki pengaruh positif terhadap TPT. Namun pengaruh ini tidak signifikan karena nilai *p-value* yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik yang lebih kecil dari 1,96.
- 5) Pada jalur IPM terhadap TPT, nilai *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan t-statistik sebesar 3,498 lebih besar dari 1,96. Nilai *path coefficient* yang diperoleh pada jalur ini adalah sebesar -0,313, yang mengindikasikan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, maka akan secara signifikan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.

b. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel

mediator dapat menjadi perantara dalam pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.12 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Jalur	<i>Path coefficient</i>	T-statistik	<i>P-value</i>
PE terhadap Kemiskinan melalui TPT	0,035	1,375	0,169
IPM terhadap Kemiskinan melalui TPT	-0,069	2,404	0,016

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan tabel IV.12 diatas, TPT tidak dapat menjadi variabel mediator dalam pengaruh PE terhadap Kemiskinan karena nilai *p-value* 0,169 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 1,375 lebih kecil dari 1,96. Sedangkan pada jalur IPM terhadap kemiskinan melalui TPT nilai *p-value* sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 2,404 lebih besar dari 1,96. Jalur ini memiliki nilai *path coefficient* sebesar -0,069, artinya setiap terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM), maka secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat Kemiskinan sebesar 0,069 melalui penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlebih dahulu.

6. Uji Efek Mediasi

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh tidak langsung pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya. Jalur pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap kemiskinan

(Y) melalui tingkat pengangguran terbuka (Z) tidak memenuhi ketentuan berikut

- a. Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
- b. Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
- c. Pertumbuhan Ekonomi (X1) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Maka uji efek mediasi pada jalur ini tidak dilakukan. Namun pada jalur indeks pembangunan manusia (X2) terhadap kemiskinan (Y) melalui tingkat pengangguran terbuka (Z) memenuhi ketentuan berikut

- a. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
- b. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y)
- c. Indeks Pembangunan Manusia (X2) harus terbukti berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan (Y) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (Z)

Maka uji efek mediasi pada jalur ini dapat dilakukan. Berikut adalah hasil uji efek mediasi pada jalur ini

Tabel IV.13 Path Coefficient

Jalur	Path Coefficient
IPM (X2) terhadap Kemiskinan (Y)	-0,573

IPM (X2) terhadap Kemiskinan(Y) melalui TPT(Z)	-0,069
---	--------

Berdasarkan Tabel IV.13 maka penghitungan VAF pada penelitian ini adalah

$$VAF = \frac{\text{Pengaruh Tidak Langsung}}{\text{Pengaruh Tidak Langsung} + \text{Pengaruh Langsung}}$$

$$VAF = \frac{(X2 \rightarrow Z \rightarrow Y)}{(X2 \rightarrow Z \rightarrow Y) + (X2 \rightarrow Y)}$$

$$VAF = \frac{(-0,069)}{(-0,069) + (-0,573)}$$

$$VAF = \frac{(-0,069)}{(-0,642)}$$

$$VAF = 0,1075$$

Hasil dari uji efek mediasi menggunakan VAF menunjukkan nilai 0,1075 atau sama dengan 10,75 %. Dikarenakan nilai berada dibawah 20% maka dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada efek mediasi. Artinya TPT memiliki efek mediasi sebesar 10,75% pada pengaruh IPM terhadap Kemiskinan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul "Determinan Kemiskinan Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sebagai Variabel Mediator Di Provinsi Aceh" yang menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024 dengan 115 observasi. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan perangkat lunak *SmartPLS 4*, hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.14 Pembahasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Jalur	Keterangan
1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (PE→Kemiskinan)	H ₀₁ diterima Ha ₁ ditolak
2	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan (IPM→Kemiskinan)	H ₀₂ ditolak Ha ₂ diterima
3	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan (TPT→Kemiskinan)	H ₀₃ ditolak Ha ₃ diterima
4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (PE→TPT)	H ₀₄ diterima Ha ₄ ditolak
5	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (IPM→TPT)	H ₀₅ ditolak Ha ₅ diterima
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (PE→TPT→Kemiskinan)	H ₀₆ diterima Ha ₆ ditolak
7	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (IPM→TPT→Kemiskinan)	H ₀₇ ditolak Ha ₇ diterima

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

Berdasarkan Tabel IV.14 di atas, berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai hasil penelitian untuk masing-masing jalur

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh langsung menggunakan *SmartPLS 4*, hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Kemiskinan memperoleh nilai t-statistik sebesar $0,762 < 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,446 > 0,05$. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Hal ini diperkuat oleh nilai ukuran dampak atau kontribusi f^2 yang hanya sebesar 0,005, nilai ini berada di bawah ambang batas minimal

0,02. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hampir tidak memberikan sumbangan yang berarti atau tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dalam model penelitian ini.

Hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,01% dengan nilai tengah (*median*) sebesar 3,56%. Nilai median yang lebih besar daripada mean ini mengindikasikan bahwa secara umum, mayoritas daerah di Aceh atau lebih dari setengah kabupaten/kota sebenarnya telah menunjukkan kinerja pemulihan ekonomi yang cukup baik dan stabil di atas 3,56% pasca-pandemi COVID-19.

Angka rata-rata wilayah secara keseluruhan ikut kecil karena terseret turun oleh beberapa daerah yang mengalami kemerosotan ekonomi lokal yang sangat ekstrem, sebagaimana tercermin dari nilai minimum yang menyentuh angka minus yaitu -3,39%. Ketimpangan performa ekonomi antar wilayah ini dipertegas oleh nilai kemiringan (*skewness*) yang bernilai negatif tajam sebesar -0,90, membuktikan adanya jurang fluktuasi ekonomi yang lebar antara daerah yang tumbuh pesat, mencapai nilai maksimum 7,50% dengan daerah yang mengalami penurunan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang telah kembali ke jalur positif di mayoritas kabupaten/kota tersebut sama sekali tidak sejalan dengan percepatan pengentasan kemiskinan. Data deskriptif kemiskinan menunjukkan nilai mean dan median yang jenuh dan terhenti di angka

yang sama persis, yaitu 15,08%. Hal ini menjadi bukti empiris di lapangan bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Aceh bukanlah fenomena musiman yang terjadi di satu atau dua wilayah saja, melainkan sudah menjadi masalah struktural menahun yang merata secara keseluruhan. Kesenjangan sosial juga tergambar sangat tajam melalui rentang jarak yang lebar antara persentase kemiskinan terendah sebesar 6,90% dengan angka kemiskinan tertinggi yang jauh tinggi hingga 20,36%. Ditambah dengan nilai *skewness* kemiskinan yang negatif sebesar -0,43%, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Aceh faktanya memiliki angka kemiskinan yang menumpuk di atas nilai rata-rata.

Temuan ini menunjukkan adanya fenomena pertumbuhan yang tidak merata (*non-inclusive growth*) atau pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja (*jobless growth*) di Provinsi Aceh. Artinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Struktur perekonomian Aceh yang masih didominasi oleh sektor utama yang mengandalkan sektor padat modal menjadi salah satu alasan.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien jalur (*path coefficient*) positif terhadap kemiskinan, yaitu sebesar 0,052. Angka ini bermakna bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi justru diikuti oleh peningkatan angka pengangguran sebesar 0,052 di Provinsi Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwa penggerak *output* perekonomian di Aceh masih didominasi oleh sektor padat modal (*capital intensive*) atau sektor ekstraktif yang minim penyerapan tenaga kerja, bukan sektor padat karya (*labor intensive*) yang berbasis kemasyarakatan. Ketika roda ekonomi bergerak naik tetapi tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai bagi masyarakat lokal, distribusi pendapatan menjadi tersumbat dan hanya berputar pada pemilik modal serta kelompok masyarakat tertentu saja. Akibatnya, kelompok masyarakat bawah kehilangan sumber pendapatan utama untuk melewati Garis Kemiskinan (GK), sehingga angka kemiskinan di Aceh tetap berada di persentase yang tinggi dan berada di atas rata-rata nasional.

Temuan ini sekaligus mengkritik penerapan Teori *Trickle Down Effect* di Provinsi Aceh. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menetes ke bawah secara otomatis melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan upah.

Dalam konteks regional Aceh, efek penetasan ke bawah (*trickle down*) tersebut terbukti tidak bekerja. Tanpa adanya kebijakan redistribusi pendapatan yang agresif dan keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan *output* agregat riil daerah hanya akan memperlebar jurang ketimpangan struktural tanpa menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sesar Apriliyanto, Syaeful Bakhri, Achmad Otong Busthomi yang menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada Kabupaten Brebes. Begitu juga dengan penelitian oleh Norma Rosyidah dan Lutfiyah yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa di Provinsi Aceh, pembagian atau distribusi hasil pembangunan belum merata dan masih terpusat pada kelompok masyarakat tertentu saja.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh langsung, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan memperoleh nilai t-statistik sebesar $8,176 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti IPM berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Koefisien jalur (*path coefficient*) bernilai negatif yaitu -0,573. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada capaian nilai IPM, maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara nyata di Provinsi Aceh.

Hal ini semakin dikuatkan oleh nilai ukuran dampak (f^2) sebesar 0,515 yang termasuk dalam kategori besar. Angka ini menegaskan bahwa kualitas manusia (IPM) merupakan faktor penentu paling utama dalam mengatasi kemiskinan pada model penelitian ini.

Temuan ini juga semakin didukung oleh data deskriptif, variabel IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan solid, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 71,43% dan nilai tengah (median) sebesar 70,11%. Berdasarkan standar UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka rata-rata yang telah menembus ambang batas 70% ini menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Aceh secara umum sudah masuk ke dalam kategori tinggi.

Kemajuan ini juga didukung oleh nilai kemiringan (*skewness*) yang bernilai positif sebesar +0,96. Nilai *skewness* positif yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa distribusi capaian IPM di kabupaten/kota di Aceh cenderung bergerak maju dan menumpuk ke arah kanan, dengan puncaknya mencapai nilai maksimum sebesar 79,32%.

Keberhasilan penyesuaian IPM yang merata ke arah kategori tinggi inilah yang menjadikan angka kemiskinan di beberapa wilayah Aceh dapat ditekan. Ketika kualitas modal manusia meningkat, masyarakat memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk keluar dari garis kemiskinan.

Tantangan struktural tetap terlihat dari adanya jurang variasi modal manusia antardaerah yang ditunjukkan dari nilai minimum IPM yang masih berada di angka 64,43%. Ketimpangan indeks pembangunan manusia di daerah-daerah dengan nilai minimum inilah yang berkaitan

dengan hasil deskriptif kemiskinan nilai maksimum kemiskinan di Aceh yang naik tinggi hingga 20,36%

Temuan ini memberikan konfirmasi nyata terhadap Teori *Human Capital* (Modal Manusia) yang dipelopori oleh Theodore Schultz dan Gary Becker. Teori ini menyatakan bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi pasif, melainkan modal utama yang kapasitasnya bisa ditingkatkan melalui investasi terencana pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Ketika derajat kesehatan masyarakat Aceh membaik dan akses pendidikan meluas, produktivitas tenaga kerja secara otomatis akan meningkat. Peningkatan produktivitas inilah yang menjadi modal utama bagi penduduk di Provinsi Aceh untuk memperoleh upah atau pendapatan yang layak di pasar kerja, yang pada gilirannya secara mandiri mampu memutus rantai kemiskinan sistemik antargenerasi.

Peran penting IPM ini juga menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi (PE) sebelumnya tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Masalah di Provinsi Aceh bukanlah kurangnya materi atau *output* daerah, melainkan masalah kapasitas serap masyarakat bawah terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsanudin Sukron dan Ach Yasin di Provinsi Jawa Tengah serta penelitian Aslam Jumain, Agus Tri Basuki, dkk di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini membawa implikasi kebijakan yang penting bagi

tata kelola pemerintahan di Provinsi Aceh; bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bertumpu pada bantuan sosial jangka pendek, melainkan harus difokuskan pada penguatan belanja urusan wajib pada sektor pendidikan, jaminan kesehatan merata, dan peningkatan standar hidup layak secara inklusif di seluruh kabupaten/kota.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh langsung, hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan memperoleh nilai t-statistik sebesar $2,873 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,004 < 0,05$. Yang berarti tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Arah koefisien yang bernilai positif 0,220 menegaskan adanya hubungan searah. Artinya, setiap terjadi kenaikan pada angka pengangguran terbuka akan berdampak langsung pada peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 0,220.

Meskipun pengaruh langsung ini terbukti signifikan, nilai ukuran dampak atau kontribusi f^2 (*effect size*) pada jalur ini hanya sebesar 0,078%. Berdasarkan kriteria pengujian model struktural, nilai ini dikategorikan memiliki ukuran efek yang kecil. Angka ini menunjukkan bahwa walaupun pengangguran secara nyata memicu

kemiskinan di Aceh, variabel TPT bukanlah satu-satunya faktor tunggal yang memotong garis kemiskinan. Daya dorong pengangguran terhadap kemiskinan ini masih beroperasi dalam skala kecil karena wilayah Aceh yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik, yang dapat ditelusuri lebih jauh melalui analisis data deskriptif.

Melalui hasil analisis statistik deskriptif, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2020–2024 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai tengah (*median*) yang berada di angka yang sama persis, yaitu sebesar 5,75%. Kesamaan nilai *mean* dan *median* ini mengindikasikan terjadinya kondisi kejenuhan struktural yang merata di lapangan. Artinya, masalah ketenagakerjaan di Aceh bukan lagi masalah di wilayah tertentu saja, tetapi menunjukkan pasar kerja domestik yang berhenti dalam menyerap angkatan kerja.

Hal ini semakin diperjelas dengan variasi pengangguran yang sangat lebar antardaerah, di mana nilai minimum tercatat serendah 1,24% yang didominasi wilayah berbasis pertanian seperti Bener Meriah dan Gayo Lues namun nilai maksimumnya membubung sangat tinggi hingga menyentuh angka 11,99% yang terjadi di pusat perkotaan dan industri seperti Lhokseumawe dan Banda Aceh. Nilai kemiringan (*skewness*) yang sangat mendekati normal 0,12 mempertegas kesimpulan bahwa pengangguran di Aceh adalah masalah struktural yang merata di seluruh wilayah, sehingga fluktuasinya secara langsung

menjadi pemicu utama yang menekan stabilitas angka kemiskinan daerah.

Hubungan positif yang signifikan antara TPT dan kemiskinan ini mengonfirmasi Teori Lingkaran Setan Kemiskinan dan pendekatan kapabilitas Amartya Sen. Pengangguran terbuka mencerminkan kondisi di mana individu yang masuk dalam angkatan kerja kehilangan hak akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Ketika seseorang menganggur, ia secara otomatis kehilangan sumber pendapatan utama untuk menopang kebutuhan konsumsi minimum rumah tangganya. Akibat nihilnya pendapatan, daya beli runtuh sehingga rumah tangga tersebut dengan cepat jatuh di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam jangka panjang, ketiadaan pendapatan ini memotong kemampuan keluarga untuk berinvestasi pada modal manusia, yang pada akhirnya mengunci mereka ke dalam jebakan kemiskinan sistemik yang diwariskan antargenerasi.

Temuan kontribusi nilai f_2 yang kecil di Provinsi Aceh juga mengindikasikan adanya fenomena pengangguran tertutup atau pekerja informal. Banyak masyarakat miskin di pedesaan Aceh yang secara statistik tidak terdata sebagai pengangguran terbuka karena mereka bekerja seadanya di sektor pertanian keluarga, meskipun produktivitasnya mendekati nol dan pendapatannya tidak layak.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa angka kemiskinan Aceh jenuh di angka tinggi 15,08%, padahal rata-rata TPT-nya berada di level

moderat 5,75%. Pengangguran perkotaan yang tinggi dipicu oleh adanya ketidaksesuaian kompetensi di sektor formal, sementara pedesaan terjebak pada kemiskinan sektor informal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Maulana Zakaria Ahmad yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, serta sejalan dengan Chairul Anwari yang mengonfirmasi hal serupa di kawasan Jabodetabek dan Agus Tri Basuki di Sulawesi Selatan yang mengonfirmasi bahwa eksistensi pengangguran selalu menjadi motor penggerak yang memperburuk performa kemiskinan daerah.

Hasil ini memberikan sinyal keras bagi pengambil kebijakan di Provinsi Aceh bahwa pengentasan kemiskinan tidak akan pernah tuntas jika awal masalah ketenagakerjaan diabaikan. Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan pertumbuhan angka PDRB padat modal, melainkan wajib menciptakan integrasi kebijakan berupa stimulus investasi pada sektor padat karya riil, standardisasi pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, serta formalisasi sektor informal guna memotong transmisi langsung dari pengangguran menuju kemiskinan struktural.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh langsung, hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memperoleh nilai t-statistik sebesar $1,598 < 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,110 > 0,05$. Yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh secara parsial.

Meskipun koefisien dalam analisis jalur persamaan kedua menunjukkan nilai positif sebesar 0,158 yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi justru diikuti oleh peningkatan pengangguran, secara statistik hubungan tersebut terbukti tidak nyata dan tidak memiliki kepastian hukum pada tingkat signifikansi 5%.

Ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi dalam memengaruhi naik turun pengangguran ini didukung oleh nilai ukuran dampak atau kontribusi f^2 (*effect size*), pada jalur PE terhadap TPT yang hanya sebesar 0,027. Berdasarkan kriteria *structural modeling*, nilai f^2 yang berada di rentang dikategorikan kecil. Angka ini menegaskan bahwa naik turunnya *output* riil perekonomian daerah di Provinsi Aceh memberikan kontribusi yang sangat lemah dan tidak dominan terhadap dinamika penciptaan atau pengurangan angka pengangguran terbuka.

Hal ini terlihat sangat jelas. Rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Aceh berada pada level moderat sebesar 3,01% dengan nilai tengah (median) sebesar 3,56%. Angka ini membuktikan bahwa roda perekonomian di lebih dari separuh wilayah Provinsi Aceh sebenarnya tumbuh dengan performa ekspansif yang cukup baik di atas 3,56%.

Di sisi lain, variabel TPT di Provinsi Aceh justru menunjukkan nilai mean dan median yang jenuh dan mengunci di angka yang sama persis, yaitu sebesar 5,75%. Terhentinya angka pengangguran di level 5,75% di tengah pemulihan ekonomi yang tumbuh positif ini mengonfirmasi adanya sumbatan besar dalam struktur ketenagakerjaan regional Aceh.

Kesenjangan spasial yang tajam antara wilayah pertanian yang memiliki TPT sangat rendah yaitu 1,24% dengan wilayah perkotaan/pusat industri yang penganggurannya membubung tinggi sebesar 11,99%. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini tidak terdistribusi secara inklusif

Temuan empiris ini secara langsung mematahkan atau bertolak belakang dengan asumsi Hukum Okun (*Okun's Law*). Dalam teori ekonomi makro konvensional, Arthur Okun menyatakan terdapat hubungan negatif yang konsisten antara pertumbuhan *output* riil dengan perubahan pengangguran, di mana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi riil di atas pertumbuhan potensialnya idealnya akan

menurunkan tingkat pengangguran. Perusahaan yang mengalami ekspansi produksi rill akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga menciptakan lowongan kerja baru.

Tidak berlakunya Hukum Okun di Provinsi Aceh menjadi bukti kokoh terjadinya fenomena *jobless growth*. Ketidaksesuaian ini terjadi karena struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Aceh masih didominasi oleh sektor-sektor sekunder dan tersier yang bersifat padat modal atau sektor ekstraktif komoditas. Sektor-sektor ini memang mampu menghasilkan nilai tambah moneter yang besar sehingga mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat minim.

Sektor pertanian dan basis ekonomi lokal yang menyerap mayoritas angkatan kerja justru mengalami pertumbuhan yang lambat dan kekurangan investasi modal fisik. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan mekanis antara pertumbuhan *output* ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja formal, sehingga ekspansi ekonomi setinggi apa pun di Aceh tidak akan mampu menurunkan angka pengangguran terbuka secara signifikan selama struktur produksinya tidak digeser ke arah padat karya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi empiris terdahulu yang dilakukan oleh Tina Angelia, Fitrah Maya Sari Hasugian, dan Joko Suharianto di Provinsi Sumatera Utara yang menemukan bahwa secara parsial pengangguran tidak memiliki hubungan linear yang sinkron

dengan pertumbuhan PDRB. Hasil ini juga diperkuat oleh riset Marlince Tara Koja, Adrianus Kabubu Hudang, dan Yuniarti Reny Renggo di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil ini memberikan rekomendasi kritis bagi Pemerintah Provinsi Aceh. Evaluasi makro menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi terjebak pada data pencapaian angka pertumbuhan PDRB yang tinggi semata. Strategi pembangunan daerah harus dirombak total menuju kerangka pertumbuhan ekonomi inklusif.

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh langsung, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memperoleh nilai t-statistik sebesar $3,498 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_5 diterima, yang berarti IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Arah koefisien bernilai negatif sebesar -0,313. Nilai koefisien negatif ini menegaskan adanya hubungan yang berbanding terbalik; artinya, setiap terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia, maka akan berdampak nyata pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh sebesar 0,313.

Meskipun hubungan langsung ini terbukti signifikan, nilai ukuran dampak atau kontribusi f^2 (*effect size*) pada jalur IPM terhadap TPT tercatat sebesar 0,107. Nilai ini dikategorikan memiliki ukuran efek yang kecil. Angka ini memberikan indikasi empiris bahwa walaupun peningkatan kualitas manusia secara nyata mampu meredam pengangguran di Aceh, variabel IPM bukanlah satu-satunya prediktor tunggal yang mendominasi perubahan angka TPT, melainkan masih terdapat faktor-faktor eksternal lain di luar model yang turut mengintervensi pasar tenaga kerja regional.

Hubungan ini dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui hasil analisis statistik deskriptif. Variabel IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2020–2024 menunjukkan nilai rata-rata (mean) yang sangat baik yaitu sebesar 73,86%. Capaian yang berada di atas ambang batas 70% ini mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat Aceh secara agregat telah masuk ke dalam kategori tinggi.

Namun, kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan oleh variabel TPT menunjukkan nilai mean dan median yang jenuh pada angka 5,75%. Kontras data ini mengindikasikan adanya tantangan struktural berupa ketimpangan antar kabupaten/kota yang tajam di Provinsi Aceh. Di wilayah pedesaan dengan basis perekonomian pertanian, angka TPT tercatat sangat rendah dengan nilai minimum 1,24% , tetapi di wilayah perkotaan dan pusat industri, angka pengangguran justru membubung tinggi hingga menyentuh nilai maksimum 11,99%.

Tingginya angka TPT di perkotaan ini disebabkan oleh melimpahnya penawaran tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh elastisitas kesempatan kerja di sektor formal. Akibatnya, peningkatan IPM yang tercatat konsisten setiap tahun baru mampu memberikan kontribusi yang kecil 0,107 terhadap penurunan pengangguran total, karena daya serap pasar kerja riil di sektor formal perkotaan masih terbatas.

Signifikansi pengaruh negatif IPM terhadap TPT ini memberikan konfirmasi kuat terhadap Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang diusung oleh Gary Becker dan Theodore Schultz. Teori ini menekankan bahwa investasi pada kapasitas internal manusia melalui perbaikan dimensi kesehatan dan pengetahuan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sosial, melainkan instrumen ekonomi yang penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan yang meluas serta derajat kesehatan yang membaik di Provinsi Aceh terbukti berhasil mentransformasikan karakteristik angkatan kerja menjadi lebih adaptif, fleksibel terhadap perkembangan inovasi, serta memiliki keunggulan kompetitif. Individu dengan bekal modal manusia yang unggul cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai peluang kerja dan lebih mudah memenuhi kualifikasi serta spesifikasi keahlian yang dituntut oleh pasar kerja modern, sehingga risiko mereka untuk jatuh ke dalam jurang pengangguran menjadi jauh lebih rendah

Hasil ini sejalan dengan penelitian Selvi Saputri dan Yefriza yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Aceh tidak boleh hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, melainkan harus terus mengaselerasi belanja urusan wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan secara merata guna mengikis ketimpangan fasilitas antardaerah.

Langkah strategis berupa penyelarasan kurikulum pendidikan formal dengan kebutuhan riil dunia industri (*link and match*) serta penguatan lembaga sertifikasi profesi menjadi syarat mutlak agar modal manusia yang telah masuk kategori tinggi ini dapat dikonversi seutuhnya menjadi tenaga kerja produktif yang terserap optimal oleh pasar kerja regional.

6. Peran TPT sebagai Variabel Mediator antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh tidak langsung menggunakan metode pengujian berulang (*prosedur bootstrapping*) pada *SmartPLS 4*, hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Kemiskinan melalui TPT memperoleh nilai t-statistik sebesar $1,375 < 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,169 > 0,05$. Yang berarti TPT tidak mampu menjadi variabel perantara atau mediator dalam menghubungkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Nilai koefisien pengaruh tidak langsung mencatatkan angka positif sebesar 0,069. Nilai tersebut secara statistik terbukti tidak nyata dan tidak memiliki kekuatan hukum pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini terjadi karena dua kondisi yang saling berkaitan yaitu, pertumbuhan ekonomi memang tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pengurangan TPT; dan meskipun secara langsung TPT berpengaruh nyata terhadap kemiskinan, jalur tidak langsung ini tetap tidak berjalan efektif karena hubungan dari PE ke TPT sejak awal sudah tidak terbukti nyata.

Pada teori ekonomi makro, variabel TPT idealnya berfungsi sebagai jembatan yang mengalirkan keuntungan pertumbuhan *output* daerah menuju pengentasan kemiskinan masyarakat bawah. Ketika ekonomi tumbuh, lapangan usaha baru terbuka, pengangguran terserap, dan otomatis kemiskinan ikut terkikis karena masyarakat memperoleh upah.

Namun, di Provinsi Aceh, mekanisme transmisi ini terputus total di tengah jalan. Sektor-sektor penyumbang utama pertumbuhan PDRB Aceh selama periode 2020–2024 terbukti tidak memiliki hubungan mekanis yang sinkron dengan penciptaan lapangan kerja formal, sehingga fluktuasi angka pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak mampu memengaruhi naik-turunnya angka pengangguran terbuka secara signifikan.

Karena pertumbuhan ekonomi gagal menggerakkan variabel TPT, maka variabel TPT pun kehilangan momentum dayanya untuk menjembatani penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini dipertegas dengan fakta dari hasil analisis deskriptif, di mana angka pengangguran (TPT) dan angka kemiskinan di Provinsi Aceh sama-sama menunjukkan kondisi kejenuhan struktural yang sangat tinggi.

Nilai *mean* dan *median* TPT mengunci di angka yang sama yaitu 5,75%, sementara angka kemiskinan jenuh di level rata-rata 15,08%. Kejenuhan yang merata secara spasial ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran di Aceh sudah bersifat kronis di setiap daerah, bukan lagi bersifat siklikal atau sesuai siklus yang bisa disembuhkan begitu saja lewat dorongan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal hanya menciptakan gelembung *output* sektoral yang semu, tanpa mampu menyentuh angkatan kerja lokal yang menumpuk di sektor domestik. Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat riset empiris terdahulu yang dilakukan oleh Marlince Tara Koja, Adrianus Kabubu Hudang, dan Yuniarti Reny Renggo di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga menemukan bahwa pengangguran tidak mampu memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan daerah akibat lemahnya elastisitas kesempatan kerja.

Hasil ini juga searah dengan temuan Retna Ningsih di Provinsi Lampung yang menyimpulkan bahwa kegagalan variabel ketenagakerjaan sebagai mediator dipicu oleh adanya distorsi distribusi pendapatan dan pertumbuhan output yang tidak inklusif.

Pemerintah daerah tidak bisa lagi menggunakan paradigma lama yang mengasumsikan bahwa kemiskinan akan selesai secara otomatis hanya dengan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Karena TPT terbukti gagal menjadi mediator, intervensi kebijakan tidak boleh lagi dilakukan secara tidak langsung, melainkan harus beralih ke strategi lainnya.

7. Peran TPT sebagai Variabel Mediator antara IPM dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh tidak langsung, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan melalui TPT memperoleh nilai t-statistik sebesar $2,404 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,016 < 0,05$. Yang berarti TPT terbukti mampu menjadi variabel perantara atau mediator dalam menghubungkan antara IPM dan Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Hasil uji efek mediasi menunjukkan nilai VAF sebesar 10,75%. Yang masuk dalam kategori hampir tidak ada mediasi atau efek mediasinya tergolong sangat lemah. Persentase VAF yang kecil ini mengindikasikan bahwa pengaruh langsung IPM terhadap penurunan kemiskinan sebesar -0,573 jauh lebih dominan dan kuat dibandingkan

pengaruh tidak langsungnya yang harus melewati variabel TPT terlebih dahulu.

Nilai koefisien mencatatkan angka negatif sebesar -0,069. Simbol negatif ini mengindikasikan bahwa intervensi TPT sebagai variabel mediator berhasil memperkuat kontribusi atau andil tambahan yang efektif dalam menekan dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 0,069 melalui jalur TPT. Temuan ini mengungkapkan bahwa IPM tidak hanya menekan kemiskinan secara langsung, tetapi juga bekerja secara tidak langsung lewat jalur pengurangan angka pengangguran. Artinya, peningkatan kualitas manusia membantu mengentaskan kemiskinan lewat dua cara sekaligus yaitu secara langsung dengan meningkatkan daya beli dan kemampuan dasar atau kapabilitas masyarakat, serta secara tidak langsung dengan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan pun ikut menurun.

Melalui nilai koefisien jalur, peningkatan kualitas IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh terbukti secara parsial sukses menurunkan angka TPT secara signifikan dengan koefisien sebesar -0,313. Penurunan angka pengangguran terbuka ini sejalan menyalurkan dampak pada berkurangnya persentase penduduk miskin riil di lapangan

Temuan ini memperkuat teori Kualitas Manusia dan Pendekatan Kemampuan (*Capability Approach*) oleh Amartya Sen. Amartya Sen

berargumen bahwa kemiskinan sejati bukanlah sekadar fenomena kekurangan materi atau rendahnya pendapatan moneter semata, melainkan wujud dari kegagalan kapabilitas individu untuk berfungsi secara optimal di dalam kehidupan bermasyarakat.

Transformasi kapabilitas ini bekerja melalui dua mekanisme transmisi sekaligus untuk meruntuhkan tembok kemiskinan regional. Secara langsung, peningkatan IPM mencerminkan membaiknya standar hidup layak dan daya beli riil masyarakat. Penduduk yang sehat dan berpendidikan memiliki kapasitas dasar yang lebih matang untuk mengelola aset ekonomi secara mandiri, memenuhi hak kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan, sehingga secara otomatis terangkat melewati batas Garis Kemiskinan (GK).

Peningkatan kualitas pembangunan manusia ini bertindak sebagai pemasok modal manusia yang berkualitas tinggi ke dalam pasar tenaga kerja domestik secara tidak langsung. Angkatan kerja di Provinsi Aceh yang dibekali dengan modal manusia yang unggul memiliki produktivitas marginal yang tinggi, lebih adaptif terhadap dinamika inovasi teknologi, serta memiliki daya saing yang jauh lebih kuat.

Keunggulan kompetitif inilah yang memudahkan mereka untuk keluar dari kerentanan pengangguran, terserap secara optimal ke dalam ceruk lapangan kerja formal yang produktif, atau menciptakan usaha mandiri yang stabil. Terserapnya angkatan kerja ini menghasilkan pendapatan utama yang konsisten bagi rumah tangga, yang secara masif

melipatgandakan kecepatan penurunan angka kemiskinan struktural di Provinsi Aceh.

Temuan ini sangat sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sesar Apriliyanto, Syaeful Bakhri, dan Achmad Otong Busthomi yang mengonfirmasi peran vital pembangunan manusia sebagai motor penggerak utama dalam memodifikasi struktur kemiskinan daerah. Hasil ini juga melengkapi analisis dari riset Chairul Anwari di kawasan Jabodetabek serta Selvi Saputri dan Yefriza di Kepulauan Riau yang secara konsisten membuktikan bahwa percepatan penguatan IPM adalah solusi paling efektif untuk meredam gejolak angka pengangguran terbuka sekaligus mengentaskan kemiskinan secara permanen.

E. Keterbatasan Penelitian

Upaya menghasilkan penelitian yang berkualitas, peneliti telah mengikuti panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, serta satu variabel mediator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Masih terdapat variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh.

2. Periode penelitian yang digunakan hanya mencakup lima tahun (2020–2024), termasuk periode terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
3. Data yang digunakan bersifat agregat per kabupaten/kota sehingga belum mampu menangkap heterogenitas pada tingkat individu atau rumah tangga yang lebih menggambarkan kondisi kemiskinan secara mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai determinan kemiskinan dengan tingkat pengangguran sebagai variabel mediator di Provinsi Aceh periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* pada 23 Kabupaten/Kota, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan terjadinya fenomena *jobless growth*, di mana ekspansi output daerah belum mampu menyentuh lapisan masyarakat bawah secara inklusif akibat dominasi sektor padat modal, sehingga Teori *Trickle Down Effect* tidak berlaku di Provinsi Aceh..
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah koefisien negatif yang kuat. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap peningkatan kualitas modal manusia pada sektor kesehatan dan pendidikan akan berdampak nyata pada penurunan persentase penduduk miskin, sesuai dengan *Human Capital Theory*.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah

koefisien positif. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya lonjakan angka pengangguran secara linear akan memicu penambahan jumlah penduduk miskin karena hilangnya hak akses pendapatan utama untuk melewati Garis Kemiskinan (GK).

4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah koefisien cenderung positif. Kenyataan ini mematahkan asumsi Hukum Okun (*Okun's Law*) di Provinsi Aceh akibat adanya distorsi pasar tenaga kerja di mana pertumbuhan ekonomi daerah gagal menciptakan lapangan kerja produktif yang memadai bagi angkatan kerja lokal lapangan kerja secara signifikan di Provinsi Aceh.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah koefisien negatif. Hal mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan dan derajat kesehatan penduduk Aceh, maka akan semakin tinggi pula produktivitas dan daya saing mereka untuk terserap ke dalam pasar kerja riil, sehingga mampu menekan angka pengangguran.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak mampu menjadi variabel mediator dalam pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh. Jalur transmisi ini terputus total sejak awal di awal perekonomian karena pertumbuhan *output* daerah riil di Provinsi Aceh sama sekali tidak

memiliki kepekaan atau korelasi mekanis dalam menggerakkan angka penyerapan tenaga kerja. Kegagalan mediasi ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT, sehingga jalur tidak langsung melalui TPT tidak dapat berjalan secara efektif.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mampu menjadi variabel mediator yang signifikan dalam pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dengan arah koefisien negatif. Hal ini berarti IPM tidak hanya berpengaruh langsung dalam menurunkan kemiskinan, tetapi juga bekerja secara tidak langsung melalui pengurangan angka pengangguran di Provinsi Aceh.

B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya, untuk menambah jumlah variabel yang diteliti agar dapat lebih luas menggambarkan variabel-variabel yang dapat menggambarkan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait bagaimana usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Saran untuk pemerintah daerah Provinsi Aceh, kiranya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan guna untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. kiranya penelitian ini dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna pengentasan kemiskinan di Provinsi

Aceh. Mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan yang menunjukkan kemungkinan terjadinya fenomena *jobless growth*, maka pemerintah hendaknya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperkuat sektor-sektor riil yang bersifat padat karya. Selain itu, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan akses pendidikan dan layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Aceh di pasar kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha, C. N., Ningrum, D. R., & Armintasari, F. (2020). *Indeks Kemiskinan Multidimensi 2015–2018 Indonesia*. Prakarsa.
- Ajizah, N., & Nizhar, M. (2017). *Mikro dan Makro Prespektif Islam*. Universitas Yudhantara.
- Alfahrunnisa, N. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Di Kalimantan Barat* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Almas, N. J. (2021). *Dampak Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Amalia, F., Sinaga, R., & Soeyatno, R. F. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Widina Bhakti Persada.
- Anwari, C., & Ambariyanto. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Jabodetabek. *Jurnal Neo-Bis*, 13(2).
- Aprianto, R., & Idayati, I. (2019). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menekan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Ardiawan, S. K. A., & Utama, M. S. (2024). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(1). <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i1.5133>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2025). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2025*. BPS Provinsi Aceh.
- Bappeda. (2015). *Strategi Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh*. Bappeda.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. UMY.
- BPS. (2023). *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023* (Vol. 15). BPS.
- BPS. (2025). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2025*. BPS Provinsi Aceh.
- Devi, A. L. (2017). *Analisis Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pengembangannya dalam Perspektif Model Penta Helix*. Universitas Brawijaya.

- Duraesa, M. A. (2021). *Kemiskinan Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Duryadi. (2023a). *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Entaresmen, A., Esther, A. M., Sumiyarti, & Hariyanti, D. (2025). *Ekonomika Makro Pengantar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6). <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1).
- Fufa, G. B. (2021). Determinants of Pro-Poor Growth and Its Impacts on Income Share: Evidence from Ethiopian Time Series Data. *The Scientific World Journal*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6645789>
- Gunistiyo, Noviany, D., & Prihadi, D. (2024a). *Metodologi Penelitian Modern*. Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal.
- Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1). <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.224>
- Hani, N. A., Syafitri, N. A., & Azzahra, R. (2025). Peran Human Capital dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Sebuah Analisis Deskriptif. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3439>
- Hardiyanti, W., Kartika, A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Kemiskinan di Kota Besar Pulau Jawa. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 8(1).
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM*. PT. Intermedia Personalia Utama.
- Hasan, M., Sudirman, A., Priyana, I., & Romadonna, Y. (2023). *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Hastin, M., & Siswadhi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 10(1). <https://doi.org/10.36272/jes.v10i2.216>
- Hidayah, S. N. (2019). *Efisiensi Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2017* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.

- Ifaturrahmi. (2023b). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021)* [Tesis]. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Imbran, H., Alkatiri, R., & Machmud, F. (2025). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, 8(1).
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jamil, H. (2017). *Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia* [Jurnal Ilmiah]. Universitas Brawijaya.
- Jamil, H. (2022). Less Inclusive Growth In Indonesia? The Unintended Consequences Of Internet Penetration. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 11(2).
- Jannah, N., Tarigan, A. A., Helmi, M., & Harahap, F. A. (2022). Rethinking Human Development: Contributions of Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, and Umer Chapra to Conventional and Islamic Indices. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2).
- Julita, J., Sudarmin, & Rais, Z. (2023). Penerapan Radial Basis Function Neural Network Dalam Mengklasifikasikan Kab/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat. *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 5(2).
- Komang, E. M., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jppsh.v9i1.92280>
- Komisi Informasi Pusat RI. (2021). *Laporan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Komisi Informasi Pusat RI.
- Kurniawan, S. R., & Suparta, M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).
- Laili, U. F. (2020). *Statistika 1*. CV. Angkasa Pelangi.
- Lestari, N. A. (2024). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di kabupaten Kebumen Tahun 2012-2022: Pendekatan Analisis autoregressive Distributed Lag (Ardl)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri (Uin) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Lumi, A. N. M., Walewangko, E. N., & Lopian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Mahri, A. J. W., Cupian, Al Arif, M. N. R., & Arundina, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-bank Indonesia.
- Marini, L., & Putri, N. T. (2019). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar? *Journal Of Economic Development*, 1(1).
- Mashabi, M., & Wasiaturrahma. (2021). Analysis of The Effect of Electronic-Based Payment Systems and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1). <https://www.e-journal.unair.ac.id/JIET/article/view/26287>
- Maziyah, L. (2021). *Analisis Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Teknik Ukur Kinerja Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Melliny, V. D., Purwanti, Y., & Akbar, R. A. (2023). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Tengah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1).
- Murjani, A. (2021). Pro-Poor Curves And Pro-Poor Growth Index: Case Study In South Kalimantan Province. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(3).
- Nasution, F. (2023). *Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Islamic Human Development Index, Kemiskinan, Pengangguran (Provinsi Sumatera Utaratahun 2016-2020)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ningsih, R. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ningsih, T. A., Saqina, N., Maula, N., & Oktavia, F. A. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Novianti, E. (2018). *Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Novitasari, N. I., & Arintoko, S. (2021). Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1).

- Nugroho, M. A. (2022). *Implementasi Hukum Okun Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Nuzulaili, D. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2).
- Oktavianoor, M. R. (2025). Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 14(2). <https://doi.org/10.20527/jbp.1414i2.76>
- Palikhah, N. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30).
- Prasetya, F. (2021). Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, 5(1).
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Rajawali Pers.
- Putri, A. nabila. (2025). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Di Provinsi Dki Jakarta Dengan Pengeluaran Pemerintah Sebagai Variabel Intervening* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahmadani. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 8(1).
- Rinalsi, A., Novalia, & Syazali, M. (2020). *Statistik Inferensial*. IPB Press.
- Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(4).
- Rosmayani, P. A., Yusuf, H. A., & Rahmayanti, T. (2022). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4).
- Rudianto, J. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Syariah, Indeks pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi Dan Tenaga Kerja Terhadap Lajupertumbuhan Ekonomi Di Indonesiaperiode 2017-2022* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Salman, R. (2018). *Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan* [Skripsi]. Universitas Islam Riau.

- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). Strategi Pengentasan Kemiskinan: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1).
- Sarahfina, Claudia, S. I., Ramadhani, R., & Fitriana, N. (2024). Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1). <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1413>
- Sari, P. H. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia Periode 2012-2023* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55304>
- Sembiring, C. F. P., & Purbadharmaja, I. B. P. (2026). Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment dan Pendapatan Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 5(1).
- Sesraria, Y., Rahmacd, M., & Jakfar, M. (2025). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. UNJA Publisher.
- Setiabudhi, H., Suwono, & Setiawan, Y. (2025). *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4*. Borneo Novelty Publishing.
- Setiawan, P., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688>
- Setiawati, E. E. (2024). Fuzzy Inference System Metode Mamdani Untuk Memprediksi IPM di Kota Langsa. *Jurnal Media Teknologi dan Informatika*, 1(3).
- Setyawan, D. A. (2021). *Modul Hipotesis Dan Variabel Penelitian*. Tahta Media Group.
- Sholekhah, U. (2018). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Reformasi*, 10(2).
- Sinaga, D. (2022). *Buku Ajar metodologi Penelitian*. UKI Press.
- Sirait, A. L., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 124–134. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i3.51435>

- Soelistyo, A., & Wicaksono, A. P. N. (2019). Econometry Model of the Impact of Macroprudential Policy on Poverty in Indonesia. *Journal Social Sciences*, 3(13). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4274>
- Sugiyono. (2024b). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D., & Handayani, N. (2022). *Grand Design Pembangunan Kependudukan*. Bimedia.
- Syarif, O. (2017). *Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/17140>
- Wasito, A. (2023). Exploring Amartya Sen's Capability Approach: Insights from Climate Change Adaptation in Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i2.109>
- Wathani, M. Z., Khafid, A., & Sa'diyah, H. (2023). *Manajemen Ekonomi ZISWAF*. Penamuda Media.
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., & Dalfian. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. CV Science Techno Direct.
- Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., Dermawan, D., & Harahap, M. N. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 10(2).
- Yudanto, B. H. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali Tahun 2013-2017* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yuliansyah. (2020). Hubungan Antara Pengangguran dan Upah Minimum Di Indonesia. *Cross border*, 3(2).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Muthmainnah Mukhtar
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 27 Maret 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 3 dari 5 Bersaudara
Alamat : Jl. Bersama 5 Kec. Losung Batu Kota
Padangsidempuan Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telepon/HP : 082162839043
Email : muthmainnahmukhtar27@gmail.com

II. PENDIDIKAN

MIN SIHADABUAN Padangsidempuan (2010-2016)
SMP IT Darul Hasan Padangsidempuan (2016-2019)
MAS AL-Uswah Binjai (2010-2022)
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
(2022-2026)

III IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Mukhtar Shabri
Pekerjaan Ayah : -
Nama Ibu : Sabrina Pasaribu
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Jl. Bersama 5 Kec. Losung Batu Kota Padangsidempuan
Sumatera Utara

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Persentase Kemiskinan

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	simeulue	18,49%	18,98%	18,37%	17,92%	17,69%
2	aceh Singkil	20,20%	20,36%	19,18%	19,15%	19,06%
3	aceh selatan	12,87%	13,18%	12,43%	12,10%	12,02%
4	aceh tenggara	13,21%	13,41%	12,83%	12,45%	11,99%
5	aceh timur	14,08%	14,45%	13,91%	13,39%	13,26%
6	aceh tengah	15,08%	15,26%	14,50%	14,38%	14,27%
7	aceh barat	18,34%	18,81%	17,93%	17,86%	17,60%
8	aceh besar	13,84%	14,05%	13,38%	13,38%	13,21%
9	pidie	19,23%	19,59%	18,79%	18,78%	18,59%
10	bireuen	13,06%	13,25%	12,51%	12,12%	12,10%
11	aceh utara	17,02%	17,43%	16,86%	16,64%	16,11%
12	aceh barat daya	15,93%	16,34%	15,44%	15,43%	15,32%
13	gayo lues	19,32%	19,64%	18,87%	18,82%	18,30%
14	aceh tamiang	13,08%	13,34%	12,61%	12,51%	12,17%
15	nagan raya	17,70%	18,23%	17,38%	17,25%	16,94%
16	aceh jaya	12,87%	13,23%	12,51%	12,42%	12,25%
17	bener meriah	18,89%	19,16%	18,39%	18,31%	18,18%
18	pidie jaya	19,19%	19,55%	18,45%	18,40%	18,28%
19	banda aceh	6,90%	7,61%	7,13%	7,04%	6,95%
20	sabang	14,94%	15,32%	14,66%	14,59%	14,58%
21	langsa	10,44%	10,96%	10,62%	10,53%	10,33%
22	lhokseumawe	10,80%	11,16%	10,84%	10,73%	10,44%
23	subulussalam	17,60%	17,65%	16,94%	16,41%	16,38%

Lampiran 2 Data Pertumbuhan Ekonomi

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	0,12%	3,41%	4,20%	4,63%	4,43%
2	Aceh Singkil	-1,01%	3,90%	3,61%	3,52%	3,46%
3	Aceh Selatan	-0,05%	2,46%	3,11%	3,53%	3,21%
4	Aceh Tenggara	-0,17%	1,57%	2,69%	3,04%	3,59%
5	Aceh Timur	1,54%	1,94%	3,73%	2,09%	4,63%
6	Aceh Tengah	-1,18%	3,30%	4,93%	5,60%	4,98%
7	Aceh Barat	1,88%	5,84%	3,28%	4,08%	7,50%
8	Aceh Besar	0,39%	2,44%	3,87%	4,37%	4,95%
9	Pidie	-0,12%	2,63%	3,98%	3,95%	4,15%
10	Bireuen	-1,02%	4,09%	4,35%	4,38%	4,52%

11	Aceh Utara	0,98%	-0,54%	4,69%	0,51%	3,56%
12	Aceh Barat Daya	-0,65%	2,88%	3,87%	3,92%	4,24%
13	Gayo Lues	0,88%	2,32%	3,51%	3,98%	3,26%
14	Aceh Tamiang	0,42%	0,88%	3,27%	2,25%	4,25%
15	Nagan Raya	3,36%	4,26%	3,17%	6,83%	4,38%
16	Aceh Jaya	-0,62%	2,59%	3,68%	4,15%	3,83%
17	Bener Meriah	0,09%	3,42%	3,42%	5,22%	3,27%
18	Pidie Jaya	-0,79%	2,03%	3,57%	4,24%	4,55%
19	Banda Aceh	-3,39%	5,51%	5,23%	5,06%	6,08%
20	Sabang	-1,29%	2,67%	2,57%	2,96%	4,16%
21	Langsa	-1,12%	3,92%	4,78%	4,22%	4,43%
22	Lhokseumawe	-1,80%	3,84%	4,01%	4,21%	4,46%
23	Subulussalam	1,97%	3,87%	4,12%	4,06%	4,12%

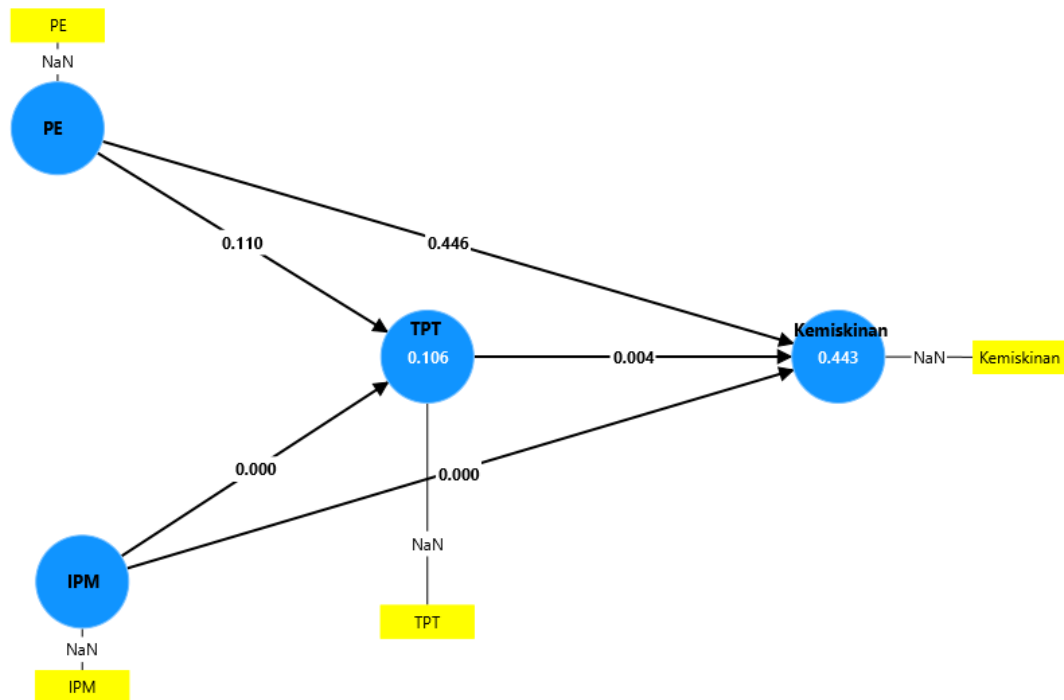
Lampiran 3 Data Indeks Pembangunan Manusia

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	67,90%	68,29%	69,17%	69,98%	70,95%
2	Aceh Singkil	69,92%	70,21%	70,61%	71,14%	71,76%
3	Aceh Selatan	69,79%	70,12%	70,56%	71,14%	71,82%
4	Aceh Tenggara	71,21%	71,28%	72,18%	72,93%	73,59%
5	Aceh Timur	69,02%	69,22%	70,13%	70,73%	71,29%
6	Aceh Tengah	75,07%	75,20%	75,79%	76,45%	77,27%
7	Aceh Barat	73,11%	73,41%	74,09%	74,62%	75,45%
8	Aceh Besar	75,00%	75,03%	75,44%	75,98%	76,57%
9	Pidie	71,92%	71,99%	72,49%	72,95%	73,60%
10	Bireuen	73,22%	73,27%	74,10%	74,56%	75,39%
11	Aceh Utara	70,95%	71,08%	71,85%	72,50%	73,35%
12	Aceh Barat Daya	69,12%	69,37%	69,79%	70,47%	71,16%
13	Gayo Lues	69,06%	69,42%	70,12%	70,82%	71,75%
14	Aceh Tamiang	70,87%	71,12%	72,08%	73,02%	74,00%
15	Nagan Raya	70,54%	70,67%	71,46%	72,15%	73,10%
16	Aceh Jaya	71,30%	71,39%	71,92%	72,44%	73,40%
17	Bener Meriah	74,54%	74,84%	75,46%	76,06%	76,58%
18	Pidie Jaya	74,44%	74,84%	75,59%	76,04%	76,39%
19	Banda Aceh	87,06%	87,36%	87,92%	88,32%	88,85%
20	Sabang	76,96%	77,29%	78,03%	78,70%	79,50%
21	Langsa	79,30%	79,58%	79,96%	80,50%	80,96%
22	Lhokseumawe	78,65%	78,92%	79,38%	80,26%	80,89%
23	Subulussalam	67,39%	67,75%	68,72%	69,66%	70,64%

Lampiran 4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	simeulue	5,47%	5,71%	6,00%	5,85%	5,50%
2	aceh Singkil	8,24%	8,36%	6,88%	6,84%	6,44%
3	aceh selatan	6,54%	6,46%	4,82%	4,73%	4,56%
4	aceh tenggara	5,72%	6,43%	5,09%	5,00%	4,79%
5	aceh timur	7,26%	7,13%	8,07%	8,03%	7,75%
6	aceh tengah	3,05%	2,61%	4,44%	4,42%	4,21%
7	aceh barat	7,30%	7,09%	6,09%	6,07%	5,58%
8	aceh besar	7,62%	7,70%	8,28%	8,17%	7,93%
9	pidie	6,45%	7,28%	5,94%	5,92%	5,74%
10	bireuen	4,12%	4,32%	4,20%	4,14%	3,93%
11	aceh utara	8,56%	8,31%	7,08%	7,07%	6,88%
12	aceh barat daya	3,93%	4,04%	4,12%	4,08%	3,83%
13	gayo lues	2,01%	1,84%	2,70%	2,65%	2,40%
14	aceh tamiang	7,97%	5,87%	7,38%	7,21%	6,95%
15	nagan raya	5,11%	4,99%	5,84%	5,74%	5,22%
16	aceh jaya	4,08%	3,47%	3,12%	2,88%	2,75%
17	bener meriah	1,35%	1,24%	2,61%	2,45%	2,20%
18	pidie jaya	6,58%	3,57%	4,40%	4,34%	3,82%
19	banda aceh	9,54%	8,94%	8,62%	8,03%	7,55%
20	sabang	4,81%	3,56%	4,01%	3,92%	2,95%
21	langsa	9,75%	7,21%	7,85%	7,73%	7,34%
22	lhokseumawe	11,99%	11,16%	9,15%	8,78%	8,47%
23	subulussalam	6,93%	6,26%	5,75%	5,69%	5,12%

Lampiran 5 Model Struktural



Lampiran 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Name	Missings	Mean	Median	Standard deviation	Skewness
IPM	0	73.865	72.950	4.393	1.440
Kemiskinan	0	15.089	15.080	3.287	-0.439
PE	0	3.010	3.560	1.975	-0.907
TPT	0	5.757	5.750	2.132	0.127

Lampiran 7 Hasil Uji Outter Model

	IPM	Kemiskinan	PE	TPT
IPM	1.000			
Kemiskinan		1.000		
PE			1.000	
TPT				1.000

Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinan(R²)

	R-square	R-square adjusted
Kemiskinan	0.443	0.428
TPT	0.106	0.090

Lampiran 9 Hasil Uji Relevansi Pediktif(Q^2)

	Q²predict
Kemiskinan	0,385
TPT	0,069

Lampiran 10 Hasil Uji Nilai f^2 (effect size)

	IPM	Kemiskinan	PE	TPT
IPM		0.515		0.107
Kemiskinan				
PE		0.005		0.027
TPT		0.078		

Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
IPM -> Kemiskinan	-0,573	8,176	0,000
IPM -> TPT	-0,313	3,498	0,000
PE -> Kemiskinan	0,052	0,762	0,446
PE -> TPT	0,158	1,598	0,110
TPT -> Kemiskinan	0,220	2,873	0,004

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
IPM -> TPT -> Kemiskinan	-0,069	2,404	0,016
PE -> TPT -> Kemiskinan	0,035	1,375	0,169